

ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN DALAM UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

**(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
Tahun 2015-2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ALISTA HENDRASARI
NIM. 115030400111049**

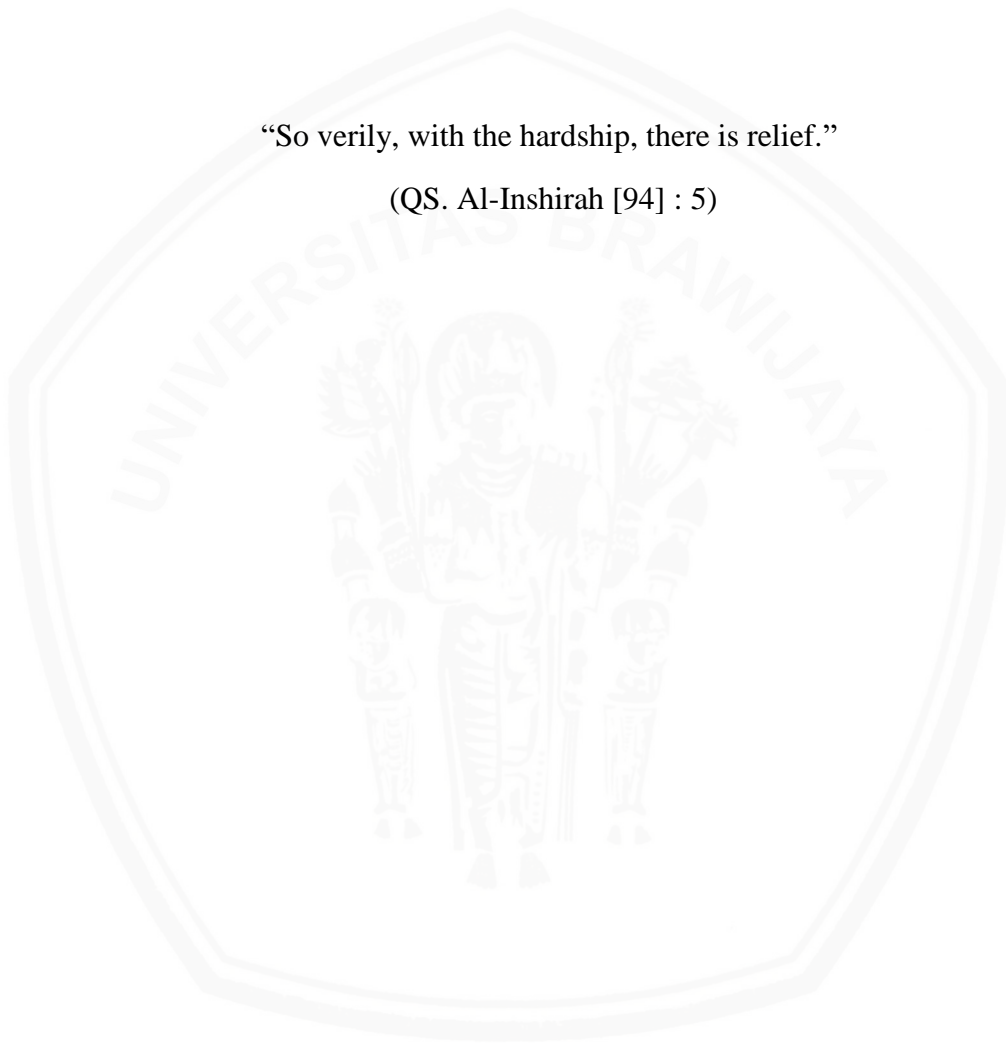


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

“Courage doesn’t mean you don’t get afraid.
Courage means you don’t let fear stop you.”

“So verily, with the hardship, there is relief.”
(QS. Al-Inshirah [94] : 5)





*In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful
I dedicate this research to my beloved parents
Who have supported me throughout the proceed*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III tahun 2015-2017)

Disusun Oleh : Alista Hendrasari

NIM : 115030400111049

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 22 Januari 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Kusdi Rahardjo, DEA
NIP. 19570127 198403 1 001



Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB
NIP. 19750627 199903 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Maret 2018

Jam : 08.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Alista Hendrasari

Judul : Analisis Efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan
dalam upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor
Pelayanan Pajak di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur III tahun 2015-2017)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



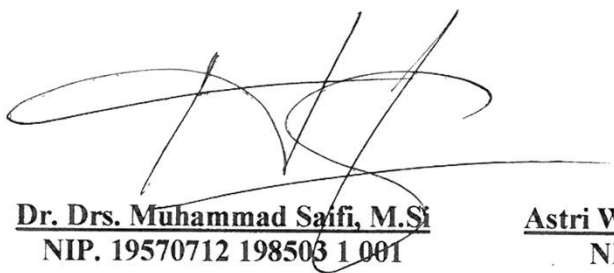
Dr. Kusdi Rahardjo, DEA
NIP. 19570127 198403 1 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak.
NIK. 20130487 0316 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Januari 2018



Nama : ALISTA HENDRASARI

NIM : 115030400111049

RINGKASAN

Alista Hendrasari, 2018. **Analisis Efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III tahun 2015-2017)**, Kusdi Rahardjo, Dr. DEA, Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB. 146hal+xviii

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik. Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian, secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa inilah yang akan menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan dalam upaya pencairan tunggakan pajak di KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan kegiatan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP dikategorikan sangat tidak efektif. Adapun yang menjadi hambatan dalam penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan di KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya yang tergolong masih rendah. Banyak Wajib Pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan, juga sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan kampanye tentang hakikat serta proses administrasi pajak; daftar-bayar-lapor harus dilakukan secara lebih intensif. Terkait dengan pelayanan, DJP harus secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat; seperti mobil pajak keliling, pojok pajak, dan *call center*.

Kata Kunci : Tunggakan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP



SUMMARY

Alista Hendrasari, 2018. **Effectiveness Analysis of Reprimand Letter, Compulsion Letter, and Confiscation in an effort to Tax Arrears Disbursement (A Study on Tax Offices under the Authority of Directorate General of Taxation East Java III during 2015-2017)**. Kusdi Rahardjo, Dr. DEA, Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB. 146 pages + xviii

As the state's primary source of income, tax is necessarily required to remain be increased in order to actualize national development well. Tax payers' active contribution in fulfilling the obligation of paying tax based on taxation provision is extremely expected. Yet, in reality there are still a lot of tax arrears as the consequence of the unpaid tax debt as it should be paid.

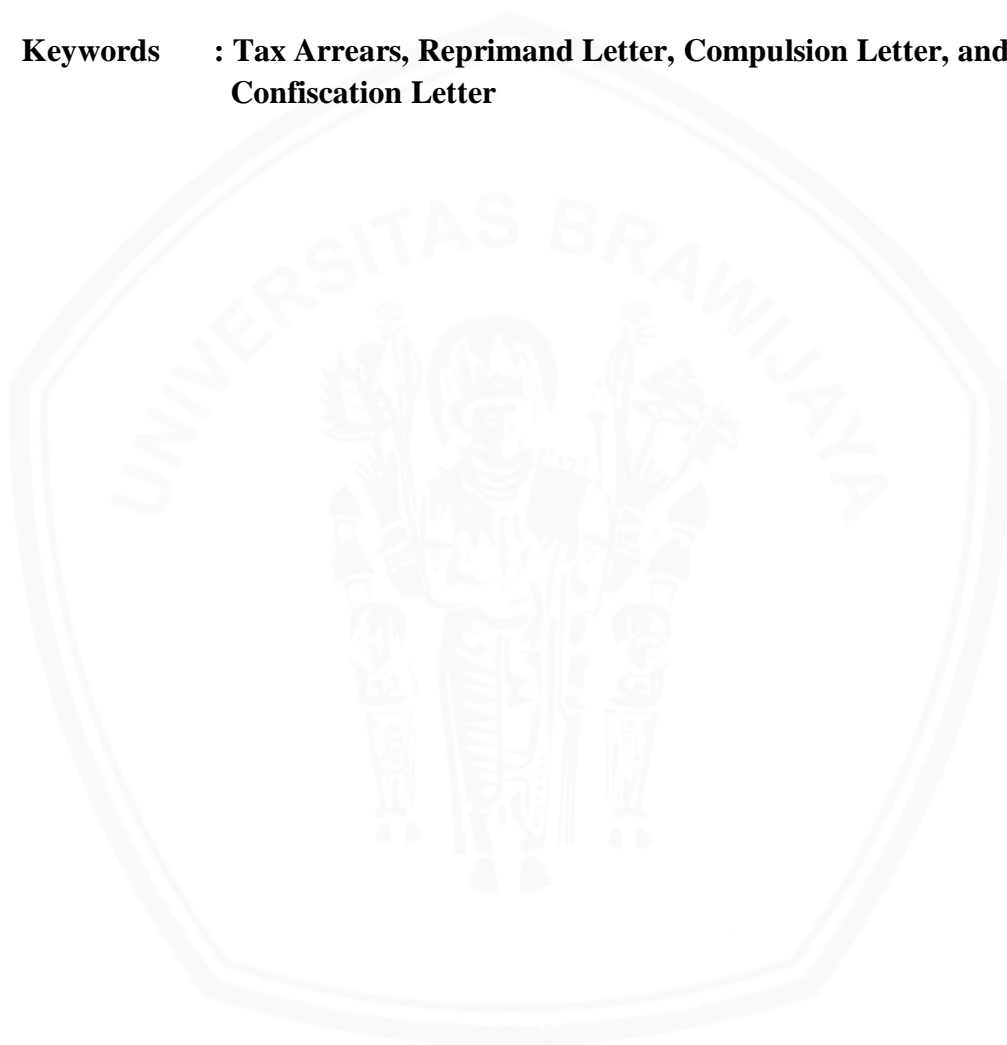
The total escalation of tax arrears in annual basis tends to rise. Unfortunately, this increase does not run hand in hand with the revenue. Nevertheless, the overall revenue in taxation sector alone is improving. Tax collection, which has compelling legal force, is required to administer toward those who have tax arrears. Law of Republic of Indonesia number 19 of 2000 about Tax Collection with Compulsion Letter becomes the legal foundation to execute tax collection.

The purpose of this study is describing the effectiveness of active tax collection by involving Reprimand Letter, Compulsion Letter, and confiscation in an effort to tax arrears disbursement in Tax Offices under the authority of Directorate General of Taxation East Java III during 2015-2017. The design of the study is descriptive research. The required data of the study are primary data in form of interview and secondary data in form of tax collection activity report which utilized Reprimand Letter, Compulsion Letter, and Confiscation Letter in 15 Tax Offices under the authority of Directorate General of Taxation East Java III during the 2015-2017 periods.

Based on the result data analysis, the effectiveness level of tax collection by involving the use of Reprimand Letter, Compulsion Letter, and Confiscation Letter is considered very ineffective. The one that becomes an obstacle in tax collection by involving Reprimand Letter, Compulsion Letter, and confiscation at Tax Offices under the authority of Directorate General of Taxation East Java III is the tax payers' low level of awareness. There are a lot of tax payers who are not fully aware of tax regulations and the penalties they will receive if they abandon their tax.

On account of this, Directorate General of Taxation needs to run campaigns regarding the tax purposes and administration processes; registering-paying-reporting has to be done intensively. Directorate General of Taxation has to consistently make the efforts to bring the service to public by running a number of programs such as mobile tax car, tax center, and call center.

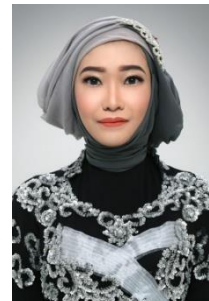
Keywords : Tax Arrears, Reprimand Letter, Compulsion Letter, and Confiscation Letter



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : ALISTA HENDRASARI
NIM : 115030400111049
Program Studi : Perpajakan
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 2 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Asal : Perum. Kebonsari Indah C-9, RT 07 RW 04
Kec. Sukun, Kota Malang
No. HP : 085755500363 / 081217280095
Alamat Email : ahendrasari@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2002 : SDN SIDOREJO IV
2002-2003 : SDN PAGENTAN I
2003-2005 : SDN GADANG IX
2005-2008 : SMP NEGERI 5 MALANG
2008-2011 : SMA NEGERI 5 MALANG
2011-2018 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Demikian *curriculum vitae* yang dapat saya berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

ALISTA HENDRASARI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III tahun 2015-2017)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Untuk itu, izinkanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo, DEA selaku ketua dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, maupun saran atas skripsi ini;
5. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB selaku anggota dosen pembimbing skripsi, bimbingan, arahan maupun saran atas skripsi ini;

6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang telah memberikan ijin melakukan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III;
7. Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Spesial untuk Bapakku tercinta Agus Suprijanto, Ibuku tercinta Sri Sulistami, dan Adikku tersayang Bismo Ishyafaputro yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk penulis sampai saat ini;
9. Spesial juga untuk Della Romanenko Susetyo yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mensupport peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Pradika Wahyu S, Mohammad Farizki W, Dika P Miftakhul, yang telah membantu untuk memberikan semangat dan masukan;
11. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Demi perbaikan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca.

Malang, Januari 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Pajak	17
1. Pengertian Pajak	17
2. Fungsi Pajak	18
3. Sistem Pemungutan Pajak	19
4. Sanksi Pajak	20
C. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak	24
1. Definisi Wajib Pajak dan Penanggung Pajak	24
2. Hak Wajib Pajak	25
3. Kewajiban Wajib Pajak.....	26
D. Penagihan Pajak	26
1. Pengertian Penagihan Pajak	26
2. Dasar Penagihan Pajak.....	28
3. Utang Pajak dan Tunggalan Pajak	29
4. Penagihan Pajak Pasif	31
5. Penagihan Pajak Aktif.....	31
6. Pejabat dan Jurusita Pajak	33
E. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	35
1. Pengertian Surat Teguran	35
2. Penerbitan Surat Teguran	36

F. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	37
1. Pengertian Surat Paksa	37
2. Pemberitahuan Surat Paksa	38
G. Penagihan Pajak dengan Penyitaan	40
1. Pengertian Penyitaan	40
2. Pemberitahuan SPMP	40
H. Pencairan Tunggakan Pajak	42
I. Efektivitas	44
1. Pengertian Efektivitas	44
2. Pengukuran Tingkat Efektivitas	44
3. Implementasi Efektivitas pada Penagihan Pajak	45
J. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	49
1. Lokasi Penelitian	49
2. Situs Penelitian	50
D. Sumber Data	50
1. Data Primer	50
2. Data Sekunder	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Wawancara (<i>interview</i>)	51
2. Dokumentasi	52
F. Instrumen Penelitian	52
G. Teknik Analisis Data	53
H. Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Gambaran Umum Kanwil DJP Jawa Timur III	58
2. Fungsi dan Tugas Kanwil DJP Jawa Timur III	60
3. Lokasi Kanwil DJP Jawa Timur III	61
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Kanwil DJP Jawa Timur III	62
5. Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	67
B. Penyajian Data	69
1. Data Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Teguran tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	69
2. Data Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Paksa tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	72

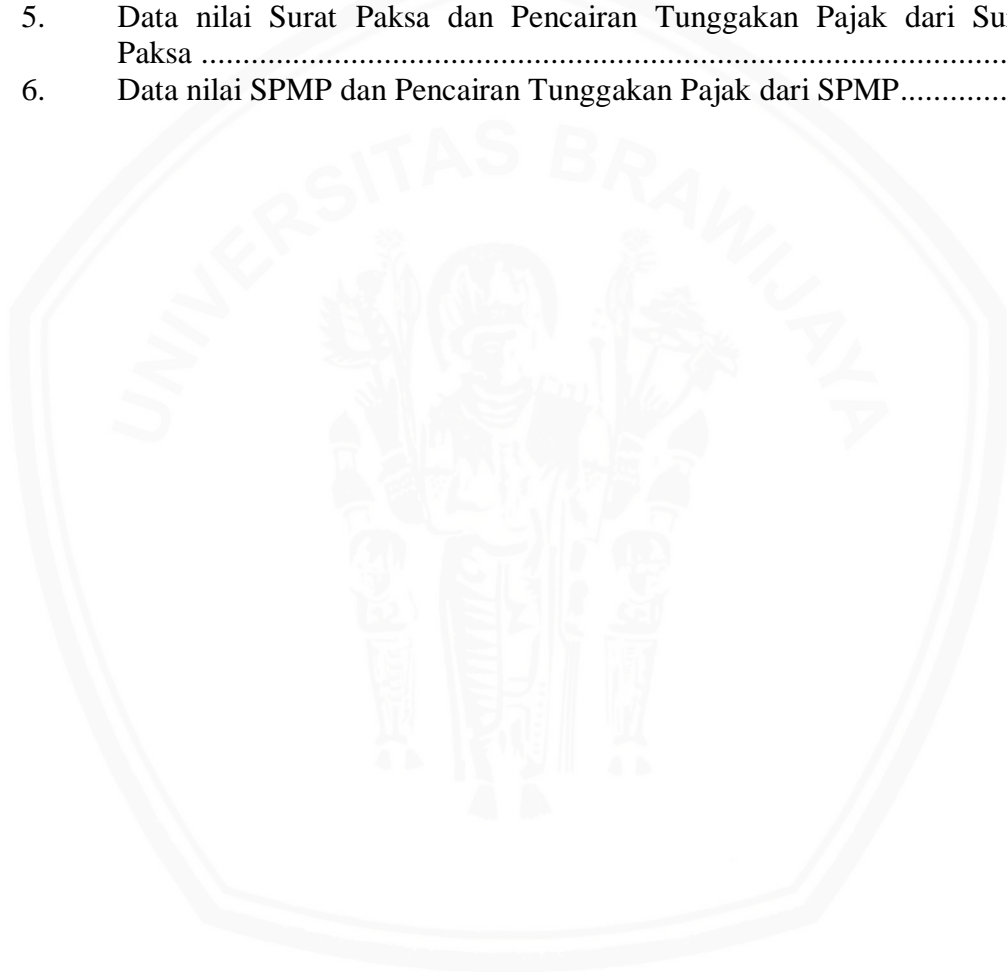
3. Data Jumlah Penerbitan dan Nilai SPMP tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	74
4. Data Nilai Pencairan Tunggal Pajak atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	77
C. Analisis dan Interpretasi Data	79
1. Efektivitas Penagihan Pajak dalam upaya Pencairan tunggakan Pajak dengan Surat Teguran tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	79
2. Efektivitas Penagihan Pajak dalam upaya Pencairan tunggakan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	85
3. Efektivitas Penagihan Pajak dalam upaya Pencairan tunggakan Pajak dengan SPMP tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	90
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.1	Perkembangan Jumlah dan Nilai Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP di 15 KPP	9
1.1	Penelitian Terdahulu	16
1.2	Sanksi Administrasi Perpajakan	20
1.3	Skala Pengukuran Tingkat Efektivitas	45
1.1	Daftar KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III	68
1.2	Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Teguran	70
1.3	Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Paksa	72
1.4	Jumlah Penerbitan dan Nilai SPMP	75
1.5	Pencairan Tunggakan Pajak atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP	77
1.6	Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tahun 2015-2017	82
1.7	Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2015-2017	87
1.8	Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan SPMP tahun 2015-2017	92

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Tahapan Pelaksanaan Penagihan Pajak	32
2.	Kerangka Pemikiran	46
3.	Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III	62
4.	Data nilai Surat Teguran dan Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran	80
5.	Data nilai Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa	86
6.	Data nilai SPMP dan Pencairan Tunggakan Pajak dari SPMP.....	91



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Pedoman Wawancara Kepala Seksi Bimbingan Penagihan	102
2.	Pedoman Dokumentasi	103
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	104
4.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus	125
5.	Surat Teguran	133
6.	Surat Paksa	134
7.	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	135
8.	Daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III beserta kode KPP dan wilayah kerjanya	137
9.	Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III	139
10.	Jumlah, Nilai, dan Pencairan Tunggakan Pajak Atas Surat Teguran tahun 2015-2017	140
11.	Jumlah, Nilai, dan Pencairan Tunggakan Pajak Atas Surat Paksa tahun 2015-2017	142
12.	Jumlah, Nilai, dan Pencairan Tunggakan Pajak Atas SPMP tahun 2015-2017	144
13.	Keterangan Pemberian Izin Riset	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara terdiri dari banyak sektor, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan aktif dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) definisi pajak adalah “Suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (publik).”

Pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat kepada negara akan digunakan untuk membuat masyarakat sejahtera. Dengan membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, perpustakaan umum, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Selain itu masyarakat juga mendapatkan manfaat subsidi atas pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pengembangan alat transportasi massa. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan penting untuk menunjang perekonomian sebuah negara.

Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target pajak. Agar target penerimaan pajak dapat tercapai, DJP telah menyusun langkah

optimalisasi penerimaan pajak yang salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* yang berlaku mulai tahun 1983 berbeda dengan sistem yang berlaku sebelumnya, yaitu *official assessment*. Dalam *official assessment system* penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (pejabat pajak), sedangkan dalam *self assessment system* wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Wajib Pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan.

Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan pada Wajib Pajak telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan *self assessment*, seperti tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Faktor yang berikutnya adalah kejujuran Wajib Pajak, faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang

harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajak sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi. Faktor yang berikutnya adalah pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak yang tidak atau kurang memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan memiliki perilaku yang tidak taat. Sebaliknya, semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

Ada kelemahan dalam sistem *self assessment* yaitu Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh tunggakan pajaknya. Untuk mengantisipasi adanya kecurangan tersebut, DJP diberikan kewenangan oleh negara untuk bertindak sebagai *Law Enforcement Agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan (Rusjdi, 2007:10). Pemerintah dalam hal ini DJP dalam menjalankan tugas sebagai *Law Enforcement Agent* tentunya melakukan tindakan pengawasan melalui pemeriksaan pajak yang nantinya dapat dilanjutkan kedalam penyidikan ataupun tindakan penagihan. Tindakan pengawasan melalui pemeriksaan pajak, dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan (SPT) atau pemeriksaan lainya oleh DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meliputi daerah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Jika dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan KPP setempat memberikan bukti bahwa Wajib Pajak memiliki utang pajak lebih besar dari yang seharusnya, maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan tersebut. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak

segera melunasi utang pajaknya maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Salah satu upaya DJP untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal adalah dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif (Suandy, 2008:173). Penagihan pajak pasif adalah tindakan penagihan pajak diluar penagihan pajak aktif di mana seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak melakukan tindakan yang nyata pada wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi hutang pajaknya.

Kegiatan penagihan pajak pasif meliputi antara lain penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan) dan Putusan Banding oleh seksi terkait hingga penerbitan surat teguran oleh seksi penagihan. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tunggakan pajak masih belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak aktif.

Penagihan pajak aktif adalah tindakan penagihan pajak di mana KPP, melalui jurusita pajak, berperan aktif dengan langsung menyampaikan penagihan kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak untuk menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan diikuti dengan tindakan sita atas barang milik penanggung pajak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang dan penjualan

barang sitaan di depan umum (Suandy, 2008:174). Dalam penagihan pajak, Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berupa bunga, denda atau kenaikan pajak. Tindakan penagihan pajak tidak akan berhasil apabila tidak ada respon dari Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus menyadari pentingnya peran pajak bagi negara. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui peran pajak, maka dengan sendirinya wajib pajak akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penerbitan Surat Teguran adalah langkah awal dalam penagihan pajak aktif. Surat teguran, Surat Peringatan (SP) atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Jika Wajib Pajak masih belum membayar utang pajaknya akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila telah disampaikan Surat Teguran dan Surat Paksa namun Wajib Pajak masih belum juga melunasi tanggungan pajaknya maka akan dilakukan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila setelah dilakukan penyitaan namun utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan lelang.

Penagihan pajak ini dilakukan oleh jurusita pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak. Tahap penagihan pajak tidak harus dilaksanakan secara menyeluruh. Apabila saat penerbitan Surat Teguran penanggung pajak langsung melunasi utang pajak, maka proses penagihan selesai pada tahap Surat Teguran. Adapun prosedur dan jangka waktu dari setiap tahap telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tindakan penagihan yang berpotensi untuk memberikan pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak adalah penagihan pajak aktif. Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Resmi, 2013: 40). Tunggakan pajak timbul apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur, dan ditagih.

Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak disertai dengan pembayaran sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan sesuai yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT. Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP), pemindahbukuan, dan pengurangan/penghapusan utang pajak.

Agar pencairan tunggakan pajak yang dilakukan DJP dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan upaya intensifikasi kegiatan penagihan pajak yang

terpadu, profesional, konsisten, berkesinambungan, terstruktur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Meskipun dalam penagihan pajak aktif terdapat pelaksanaan lelang, namun penelitian ini hanya berfokus pada penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan dikarenakan bahwa penagihan aktif yang berpotensi untuk mencairkan tunggakan pajak secara umum hanya sampai pada tahapan penyitaan, sehingga data tentang pelaksanaan lelang kurang memenuhi kriteria sebagai data yang diinginkan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penagihan pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti. Misbachul Wahyudi (2016) telah melakukan penelitian berjudul Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Teguran dalam pelunasan tunggakan pajak yang dicapai tahun 2012-2015 sangat tidak efektif, sedangkan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam pelunasan tunggakan pajak efektif pada tahun 2015, efektivitas Surat Paksa tidak efektif pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 sampai 2014 sangat tidak efektif di KPP Pratama Batu.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Wahyudi (2016). Peneliti sebelumnya melakukan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu,

sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang dilakukan oleh 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (disingkat Kanwil DJP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan. Alasan mengapa memilih Kanwil DJP Jawa Timur III sebagai tempat penelitian adalah karena Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada posisi strategis, diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa. Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III juga didominasi oleh dataran yang subur. Selain itu, dengan garis pantai yang hampir mengelilingi semua kota dan kabupatennya, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III juga terkenal dengan pesona pantainya sehingga potensial sebagai kawasan wisata.

Kanwil DJP Jawa Timur III membawahi 15 KPP dan memiliki wilayah kerja sebanyak 13 kabupaten dan 6 kotamadya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha). Selain itu, terdapat 1.791.999 Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang tersebar dalam 15 KPP yang berada di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III.

Namun, dewasa ini banyak Wajib Pajak orang pribadi maupun badan melakukan kelalaian dan tidak disiplin dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2017, menyebutkan bahwa selama tahun 2017 terdapat 44.445 lembar Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Peniyitaan (SPMP) yang diterbitkan di 15 KPP, dengan rincian 33.913 lembar Surat Teguran bernilai Rp142.197.768.001, 10.209 lembar Surat Paksa bernilai Rp83.996.085.295, dan 323 lembar SPMP dengan nilai Rp62.058.403.674.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah dan Nilai Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP di 15 KPP

Tahun	Surat Teguran		Surat Paksa		SPMP	
	Jumlah	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	Jumlah	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	Jumlah	Nilai (dalam Milyar Rupiah)
2015	22.980	227,7	11.880	140,5	220	164,8
2016	45.596	305,8	15.042	132,0	409	65,5
2017	33.913	142,2	10.209	84,0	323	62,1

Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III (2017)

Tunggakan pajak yang terjadi di 15 KPP di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III disebabkan oleh kurang patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai cara telah dilakukan oleh DJP agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah

mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Penagihan dilaksanakan dengan ketentuan undang-undang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III tahun 2015-2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam upaya pencairan tunggakan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam upaya pencairan tunggakan pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pencairan tunggakan pajak

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang dilakukan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.
- b. Sebagai bahan pertimbangan KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan, dalam hal ini pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistem perbandingan ini digunakan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini diuraikan apa yang menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan serta menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, yang berhubungan dengan penagihan pajak, termasuk Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan, serta pencairan tunggakan pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang hasil analisisnya akan dibahas secara mendalam di bab IV.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, pembahasan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan juga saran yang dapat dijadikan masukan terutama untuk peneliti dan untuk instansi Direktorat Jenderal Pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Walewangko (2016)

Penelitian dilakukan oleh Walewangko (2016) dengan judul “Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan di KPP Pratama Ambon. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan di KPP Pratama Ambon tahun 2013-2015 dikategorikan tidak efektif.

2. Penelitian Wahyudi (2016)

Penelitian dilakukan oleh Wahyudi (2016) berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari Surat Teguran dan Surat Paksa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran

dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak yang dicapai tahun 2012-2015 dikategorikan sangat tidak efektif, sedangkan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dikategorikan efektif pada tahun 2015, efektivitas Surat Paksa dikategorikan tidak efektif pada tahun 2012 , dan pada tahun 2013-2014 dikategorikan sangat tidak efektif di KPP Pratama Batu. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari Surat Teguran dan Surat Paksa tahun 2012-2014 dikategorikan sangat tidak optimal dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu, dan pada tahun 2015 menjadi sangat optimal.

3. Penelitian Syahputra (2015)

Penelitian dilakukan oleh Syahputra (2015) berjudul “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif explanatory. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Surat Teguran, Surat Paksa, dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Teguran, Surat Paksa, dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan secara bersama-sama dan parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak, akan tetapi yang dominan mempengaruhi pembayaran tunggakan pajak adalah sanksi administrasi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Walewangko (2016)	Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon	Kualitatif deskriptif	Tingkat keefektifan pencairan tunggakan paja dengan tindakan penyitaan belum efektif
2.	Wahyudi (2016)	Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Tegurandan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu	Kuantitatif deskriptif	Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dikategorikan sangat tidak efektif, sedangkan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dikategorikan masih sangat kurang
3.	Syahputra (2015)	Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)	Kuantitatif explanatory	Surat Teguran, Surat Paksa, dan sanksi administrasi berpengaruh secara bersama-sama dan parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak

Sumber: Data diolah (2017).

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa pengertian tentang pajak diungkapkan oleh para ahli diantaranya adalah:

a. Menurut Andriani dalam Rahayu (2009:22)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

b. Pengertian pajak menurut Sommerfeld, dkk dalam Rahayu (2009:22)

“Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives”

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

c. Menurut Djajadiningrat dalam Priantara (2012:2)

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Berdasarkan pengertian pajak yang diungkapkan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pajak adalah iuran atau kewajiban kepada negara
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- 3) Pajak dapat dipaksakan
- 4) Tidak menerima atau memperoleh prestasi kembali
- 5) Untuk membiayai pengeluaran umum negara

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Fungsi yang pertama adalah fungsi *budgeter* atau fungsi pendanaan. Fungsi yang kedua adalah fungsi *reguler* atau mengatur. Menurut Waluyo (2011:6) fungsi pajak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Dari pemaparan tentang fungsi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan fungsi *budgeter* pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, subsidi dan belanja operasional lainnya. Berbeda dengan fungsi *budgeter*, fungsi *reguler* lebih menitikberatkan tujuan tertentu demi terlaksananya stabilisasi Negara, sebagai

contoh untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dan memperbanyak ekspor untuk menaikkan perekonomian Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* (Mardiasmo, 2009:7).

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (pemotong atau pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya

yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

4. Sanksi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Perpajakan

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
Denda			
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan WP Orang Pribadi	a. Rp 500.000,00 b. Rp 100.000,00 c. Rp 1.000.000,00 d. Rp 100.000,00
2.	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Lanjutan Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Perpajakan

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
4.	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5.	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
Bunga			
1.	8 ayat (2)	Pembetulan SPT Tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
2.	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
3.	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
4.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran

Lanjutan Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Perpajakan

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
5.	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah pajak kurang dibayar, maksimal 24 bulan
6.	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	14 ayat (3)	a. PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maksimal 24 bulan
8.	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
9.	19 ayat (1)	SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak kurang bayar terlambat dibayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
10.	19 ayat (2)	Menangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal diterbitkannya STP
11.	19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

Lanjutan Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Perpajakan

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
Kenaikan			
1.	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	13 ayat (3)	a. SKPKB kereta SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam Surat Teguran b. PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam setahun 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	13 A	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
4.	15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
5.	17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu	100% dari kekurangan pembayaran pajak
6.	17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

Sumber: Diolah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2017).

C. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

1. Definisi Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Definisi Penanggung Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep penanggung pajak ini lebih ditujukan untuk penyelesaian urusan penagihan pajak dan pelunasan semua utang pajak. Wajib Pajak orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perpajakan. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Priantara (2012:115) menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

- a. Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus (direksi atau pegawai perusahaan yang berwenang mengurus dan menjalankan kewajiban perpajakan),
- b. Wajib Pajak Badan yang sedang dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh orang atau satu Badan yang dibebani dengan pemberesan (kurator, likuidator),
- c. Suatu warisan yang belum terbagi diwakili oleh sang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya,
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunya.

2. Hak Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Yang meliputi hak Wajib Pajak antara lain:

- a) Hak dalam Wajib Pajak dilaksanakan pemeriksaan
- b) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali
- c) Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak
- d) Hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

- e) Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan
- f) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25
- g) Hak untuk pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- h) Hak untuk pembebasan pajak
- i) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- j) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
- k) Hak untuk mendapat insentif perpajakan

3. Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban Wajib Pajak antara lain:

- a) Kewajiban mendaftarkan diri yang meliputi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- b) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak
- c) Kewajiban dalam hal diperiksa
- d) Kewajiban memberi data

D. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Pengertian penanggung pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian penagihan pajak menurut Priantara (2012:110) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara:

- a. Menegur atau memperingatkan,
- b. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
- c. Memberitahukan Surat Paksa,
- d. Mengusulkan pencegahan,
- e. Melaksanakan penyitaan,
- f. Melaksanakan penyanderaan, dan
- g. Menjual (melelang) barang yang telah disita.

Tujuan dari penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Hal ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapat pelunasan atas semua utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak baik dengan cara persuatif dan administrasi hingga cara penyitaan dan pelelangan. Penjualan barang yang telah disita biasanya

dilakukan melalui pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain diperdagangkan melalui bursa efek.

2. Dasar Penagihan Pajak

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu:

a) Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

d) Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SKP, STP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

e) Surat Keputusan Keberatan

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

f) Putusan Banding

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

3. Utang Pajak dan Tunggakan Pajak

a. Definisi Utang Pajak

Pajak timbul karena timbulnya suatu kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Pajak karena suatu objek pajak berdasarkan Undang-Undang, dan hutang pajak berakhir karena Wajib Pajak telah melunasi atau kriteria lain yang membuat berakhirnya hutang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak menurut Resmi (2003:5) yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. Ajaran materiil ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya undang-undang. Tidak ada utang pajak yang timbul jika tidak ditetapkan oleh undang-undang. Ajaran ini sesuai dengan *Self Assessment System* karena Wajib Pajak sendiri yang menghitung kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya STP atau SKP dari pemerintah. Tidak ada utang pajak yang timbul jika tidak ada penagihan atau penetapan oleh pemerintah. Ajaran ini sesuai dengan *Official Assessment System* karena pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang dan kapan harus membayar.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- 1) Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- 2) Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- 3) Pada akhir tahun pajak, untuk Pajak Penghasilan.

b. Definisi Tunggal Pajak

Menurut Resmi (2003:20) “Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dimaksud tunggakan pajak adalah pajak yang belum dibayar dan masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan dalam masa pajak, tahun pajak atau

bagian tahun pajak berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

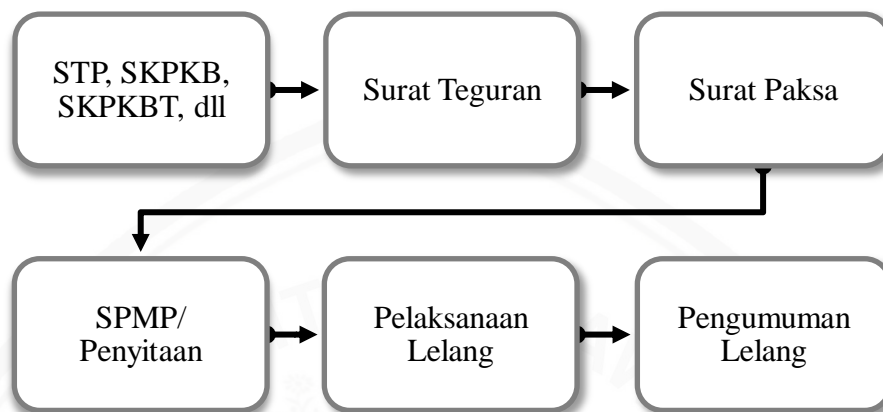
4. Penagihan Pajak Pasif

Menurut Suandy (2011:169) Tindakan penagihan dikelompokkan menjadi 2 yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Definisi penagihan pajak pasif adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan dengan menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari utang pajak belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

5. Penagihan Pajak Aktif

Menurut Suandy (2011:170) penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan, dan Surat Putusan banding setelah 30 hari belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan penagihan pajak aktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan penagihan pajak sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Penagihan Pajak

Sumber : Diolah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus (2017)

Berdasarkan skema di atas, kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan memakan waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo 30 hari maka akan diterbitkan Surat Teguran.
2. Selanjutnya Surat Paksa akan diterbitkan dan disampaikan oleh Jurusita pajak apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak juga masih belum membayar utang pajaknya.

3. Apabila penanggung pajak masih belum melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang tertera dalam Surat Paksa yaitu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka pejabat pajak dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah terbitnya SPMP ini, Jurusita pajak mempunyai kuasa atas aset atau harta, termasuk hak penanggung pajak.
4. 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPMP namun penanggung pajak masih belum membayar utang pajaknya, pejabat pajak menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakannya pengumuman lelang ternyata penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat pajak melakukan penjualan atas aset penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

6. Pejabat dan Jurusita Pajak

a. Pejabat

Menteri Keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala KPP atau Kantor Pelayanan PBB. Adapun untuk pajak daerah, kepala daerah berwenang untuk menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. Yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Priantara, 2012:112).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, kewenangan pejabat dalam pelaksanaan penagihan pajak antara lain:

- 1) mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
- 2) menerbitkan:
 - a) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c) Surat Paksa;
 - d) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e) Surat Perintah Penyanderaan;
 - f) Surat Pencabutan Sita;
 - g) Pengumuman Lelang;
 - h) Surat Penentuan Harga Limit;
 - i) Pembatalan Lelang; dan
 - j) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Jurusita Pajak

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, khususnya penagihan pajak dengan Surat Paksa, kewenangan Kepala Kantor tersebut dilaksanakan oleh jurusita. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Jurusita pajak Bertugas untuk:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP); dan
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penagihan pajak, jurusita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Pengadilan Negeri, Bank, atau pihak lain.

E. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

1. Pengertian Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran adalah langkah awal dalam penagihan pajak aktif. Menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud

dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Langkah ini dimaksudkan sebagai peringatan agar Penanggung Pajak segera melunasi utang pajaknya.

2. Penerbitan Surat Teguran

Surat Teguran diterbitkan oleh Seksi Penagihan di KPP. Prosedur penerbitan Surat Teguran sebagai berikut:

- 1) Pelaksana pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi yang kemudian diteruskan kepada Kepala KPP melalui Sistem Informasi DJP.
- 2) Kepala KPP memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP.
- 3) Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dari Kepala KPP, mencetak Surat Teguran lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- 4) Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran dan menugaskan pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala KPP.
- 5) Kepala KPP meneliti, menandatangani Surat Teguran kemudian meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.

- 6) Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala KPP dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

F. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

Menurut Pasal 8 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis;
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut Pasal 7 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. dasar penagihan;
- c. besarnya utang pajak; dan
- d. perintah untuk membayar.

2. Pemberitahuan Surat Paksa

Menurut Pasal 10 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa terhadap Wajib Pajak orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada:

- 1) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Menurut Pasal 7 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. Jika tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa tersebut. Jika tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman

kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan surat keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

G. Penagihan Pajak dengan Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2009:122) Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat kedudukan penanggung pajak. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahului barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terlebih dahulu terhadap barang bergerak.

2. Pemberitahuan SPMP

Apabila setelah lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak juga tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya oleh 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap pelaksanaan

penyitaan, jurusita pajak wajib membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi.

Barang yang dapat disita antara lain sebagai berikut:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, dan deposito berjangka, tabungan, giro, saldo rekening koran, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan antara lain sebagai berikut:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya,
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah,
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara,
- d. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan,
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah,

- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

H. Pencairan Tunggakan Pajak

Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dilunasi tepat waktu. Apabila setelah melewati tanggal jatuh tempo pajak tersebut masih belum dilunasi oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, maka hal ini lah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak. Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2003, 64) adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat

kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

4. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, Wajib Pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
6. Wajib Pajak pindah yang artinya Wajib Pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak disertai dengan pembayaran sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan sesuai yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT. Untuk mengurangi besarnya tunggakan pajak dapat diambil langkah-langkah antara lain dengan melunasi tunggakan pajak, meningkatkan pelaksanaan kegiatan penagihan, meningkatkan penyelesaian permohonan keberatan, dan melakukan penghapusan utang pajak. Dalam penelitian ini dibahas secara lebih mendalam pencairan tunggakan pajak melalui kegiatan penagihan yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan.

I. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang mempunyai arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas dapat diartikan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Menurut Mardiasmo (2004:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan (*Spending wisely*). Menurut Kurniawan (2005:109) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengukuran Tingkat Efektivitas

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya sesuatu diperlukan sebuah indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah rumus formula agar sesuatu dikatakan efektif atau tidak. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, 2004:164).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Setelah itu kemudian diukur dengan skala tingkat efektivitas. Berikut adalah skala pengukuran tingkat efektivitas menurut Jones dan Pendlebury (2000:13).

Tabel 2.3 Skala Pengukuran Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
80%-100%	Efektif
60%-80%	Cukup Efektif
40%-60%	Tidak Efektif
0%-40%	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Jones dan Pendlebury (2000:13).

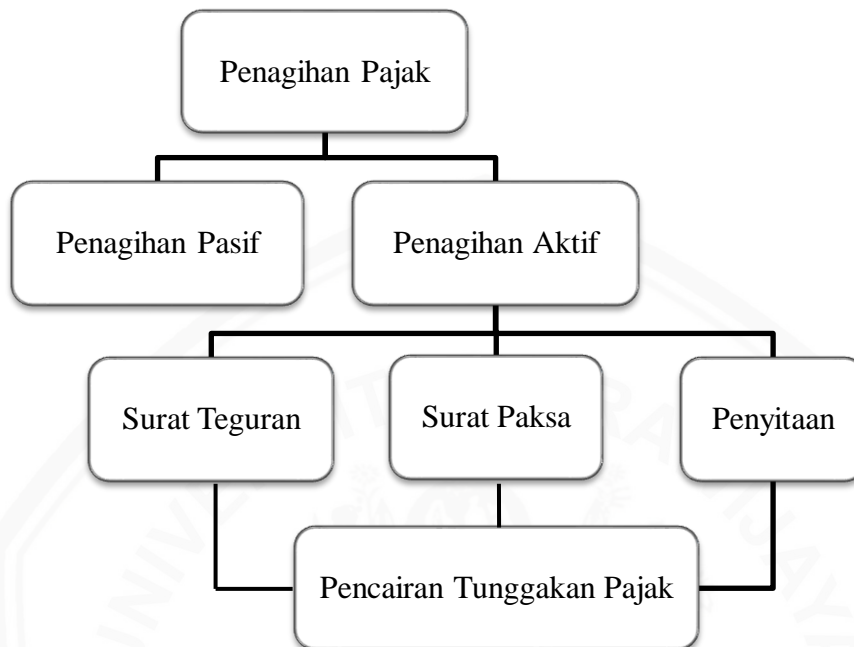
3. Implementasi Efektivitas pada Penagihan Pajak

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam implementasinya, perhitungan tingkat efektivitas penagihan dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP adalah apabila semakin tinggi hasil perhitungan presentase tingkat efektivitasnya, maka dapat diartikan bahwa penagihan pajak tersebut efektif terhadap mencairkan tunggakan pajak. Apabila semakin rendah hasil perhitungan presentasi tingkat efektivitasnya, maka dapat diartikan bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP tidak efektif.

J. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kerangka pemikiran dapat dijelaskan dengan menggunakan suatu diagram atau skema. Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang efektivitas Surat Paksa, Surat Teguran dan Penyitaan dalam upaya pencairan tunggakan pajak di 15 Kantor

Pelayanan Pajak di wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Agar lebih jelas, berikut digambarkan kerangka pemikirannya:

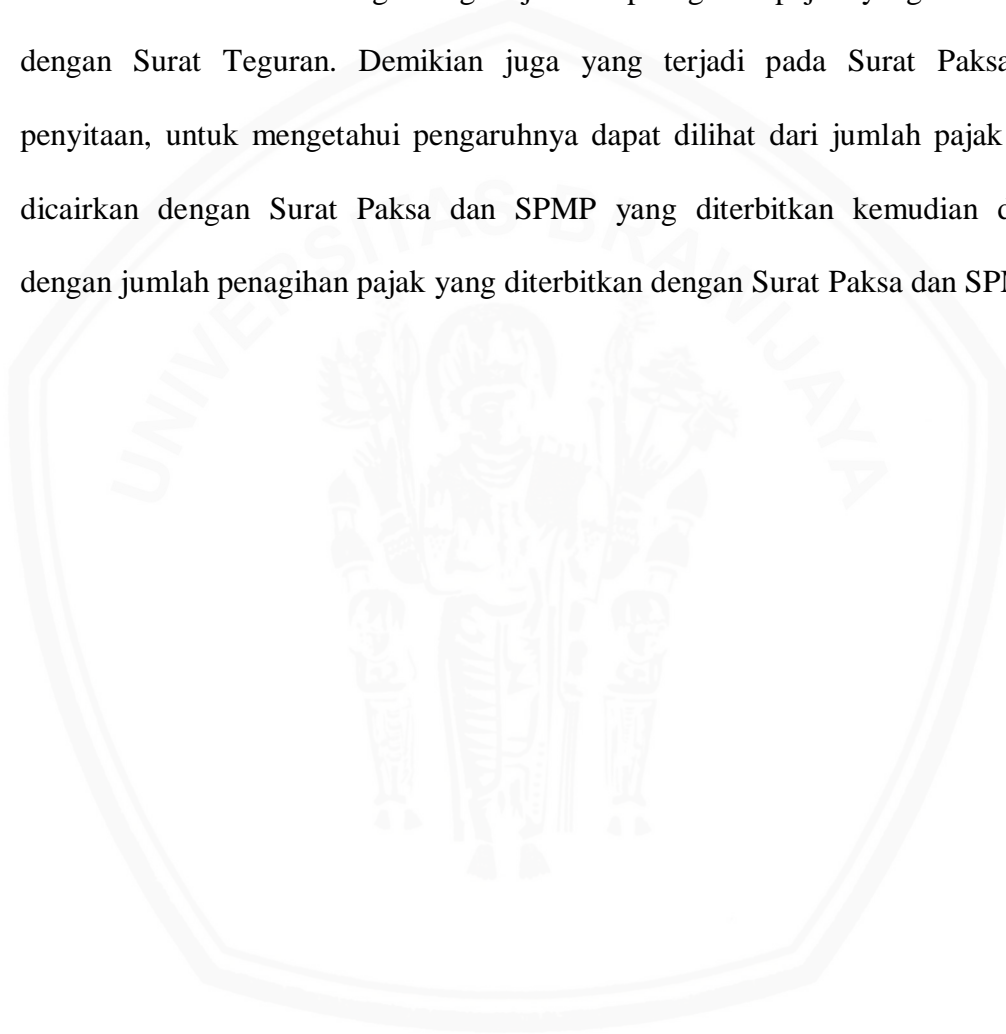


Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah (2017)

Penagihan pajak aktif dalam penelitian ini menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan. Surat Teguran diterbitkan apabila utang pajak tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo 30 hari. Surat Paksa diterbitkan dan disampaikan oleh Jurusita pajak apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterbitkan dan penanggung pajak masih belum melunasi utang pajaknya. Jika penanggung pajak masih belum melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang tertera dalam Surat Paksa yaitu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka pejabat pajak dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah terbitnya SPMP ini, jurusita pajak mempunyai kuasa atas aset atau harta, termasuk hak penanggung pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam upaya pencairan tunggakan pajak di KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Adapun efektivitas Surat Teguran dapat dilihat dari jumlah pencairan pajak yang dibayarkan dengan Surat Teguran yang diterbitkan kemudian dibagi dengan jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dengan Surat Teguran. Demikian juga yang terjadi pada Surat Paksa dan penyitaan, untuk mengetahui pengaruhnya dapat dilihat dari jumlah pajak yang dicairkan dengan Surat Paksa dan SPMP yang diterbitkan kemudian dibagi dengan jumlah penagihan pajak yang diterbitkan dengan Surat Paksa dan SPMP.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian memegang peran yang penting di mana menunjukkan ke arah mana penelitian tersebut, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar (2013:10) Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti hendak menggambarkan dan mendeskripsikan hasil olahan data terkait dengan efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan dalam upaya pencairan tunggakan pajak di KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu awal permulaan yang dijadikan sebagai ranah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas dan secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Fokus penelitian merupakan pusat dari suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, fokus penelitian mempermudah untuk memilih data apa saja yang digunakan dalam penelitian (Meolong, 2014:93). Fokus penelitian akan mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang dimaksudkan sesuai dengan tema penelitian

yang kemudian diolah dan dianalisa. Berdasarkan rumusan masalah, maka fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

Efektivitas tindakan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan berupa nilai dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015-2017, dan nilai dari pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP tahun 2015-2017 oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak penelitian yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang terletak di Jalan S. Parman No 100 Malang, Jawa Timur. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III membawahi 15 KPP dan memiliki wilayah kerja sebanyak 13 kabupaten dan 6 kotamadya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha). Alasan pemilihan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III sebagai lokasi penelitian adalah karena Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III memiliki wilayah kerja yang luas, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk penelitian ini.

2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III karena bidang ini mempunyai tugas yang sangat kompleks dalam hal melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

D. Sumber Data

Terdapat 2 (dua) klasifikasi sumber data menurut Azwar (2001:91) yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur dan alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat secara langsung dari pihak Kanwil DJP Jawa Timur III dengan maksud menggali informasi terkait penelitian maupun pengambilan data yang diwakili oleh 1 (satu) orang yaitu kepala seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III.

2. Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data *time series* penagihan pajak 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yang meliputi nilai Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP yang diterbitkan tahun 2015-2017, dan nilai pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP tahun 2015-2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menentukan teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian karena strategi ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang sedang dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Menurut Moleong (2014:186) Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden/informan yang telah dipilih secara sengaja, yaitu wawancara dengan kepala seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan adalah:

- a. Mencatat atau memperoleh data awal mengenai gambaran umum dari Kanwil DJP Jawa Timur III.
- b. Mencatat atau mengumpulkan data tentang laporan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jawa Timur III.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri serta alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2006:151). Berdasarkan teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan penelitian ini meliputi:

1. Peneliti Sendiri (*human instrument*)

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* harus menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan memasuki lapangan. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan proses wawancara dengan informan. Kegiatan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III. Alat bantu yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara yaitu alat perekam suara dan gambar berupa *handycam* sebagai media perekam saat melakukan proses kegiatan wawancara dengan informan.

3. Pedoman Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biken dalam Ahmadi (2016:179) “Pengertian dokumen di sini mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara”. Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini antara lain pendokumentasian segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian berupa data nilai dan pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015-2017.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Widi (2010:253) Analisis data adalah proses menghimpun, atau pengumpulan, permodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Analisis data mempunyai banyak variasi

pendekatan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) Dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data antara lain:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau pengambilan aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Penelitian ini melibatkan perhitungan kuantitatif sederhana yang menyajikan perhitungan angka dan presentase. Penghitungan kuantitatif digunakan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan penelitian. Secara detail penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menekankan pada pembahasan data-data secara sistematis. Data yang telah diperoleh peneliti dari

penelusuran di lapangan dan studi kepustakaan, data tersebut selanjutnya akan dianalisis, yaitu dengan cara:

- a. Menganalisis data mengenai Surat Teguran dengan memberikan gambaran atau deksripsi suatu data yang dilihat dari capaian nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi, dan nilai terendah.
- b. Menganalisis data mengenai Surat Paksa dengan memberikan gambaran atau deksripsi suatu data yang dilihat dari capaian nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi, dan nilai terendah.
- c. Menganalisis data mengenai SPMP dengan memberikan gambaran atau deksripsi suatu data yang dilihat dari capaian nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi, dan nilai terendah.
- d. Menghitung tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan periode 2015-2017 dalam upaya pencairan tunggakan pajak periode 2015-2017.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk skala pengukuran tingkat efektivitas menurut Jones dan Pendleburry (2000:3) menunjukkan bahwa presentase 0%-40% dikategorikan sangat tidak efektif, 40%-60% dikategorikan tidak efektif, 60%-80% dikategorikan cukup efektif, 80%-100% dikategorikan efektif, dan lebih dari 100% dikategorikan sangat efektif.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2014:121) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dalam pengecekan data ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data *credibility* yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan suatu kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut (Sugiyono, 2014:127).

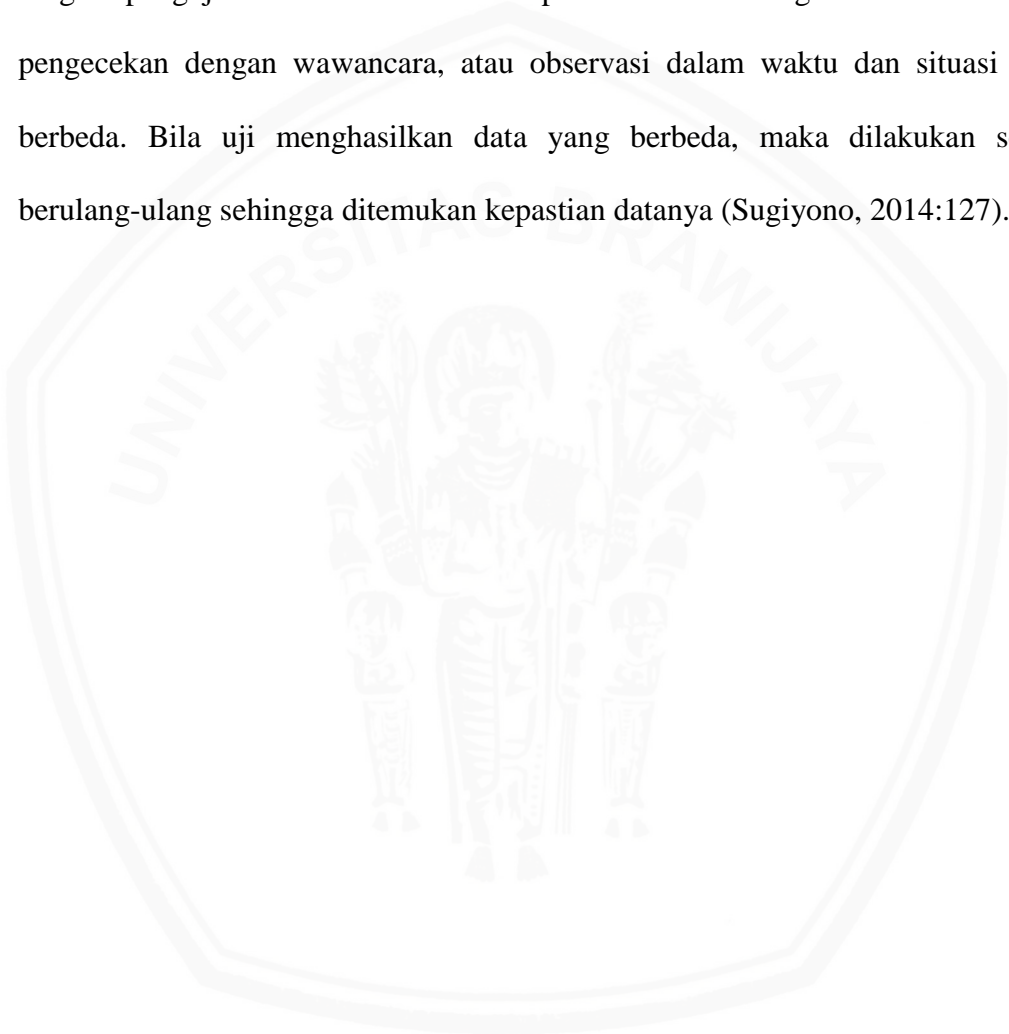
2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Untuk mengecek data bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data

yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2014:127).

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, atau observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2014:127).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kanwil DJP Jawa Timur III

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Malang ini didirikan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada posisi strategis, diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa. Menurut data Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB), sektor industri menempati ranking teratas sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Timur, disusul sektor perdagangan di ranking kedua dan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di tempat ketiga. Sebagian besar industri berada di wilayah Malang, Kediri, dan Pasuruan.

Di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III terdapat berbagai macam moda transportasi yang mendukung mobilisasi penumpang dan distribusi barang. Di samping jalur kereta api yang melintang dari ujung barat ke ujung timur, wilayah

kerja Kanwil DJP Jawa Timur III juga memiliki bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Jember, serta Bandara Blimbingsari di Banyuwangi. Selain itu terdapat pula pelabuhan-pelabuhan berskala kecil seperti Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan Kalbut di Situbondo, dan Pelabuhan Paiton di Probolinggo. Beberapa pelabuhan besar yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya, Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali, dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura.

Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III juga terkenal sebagai kawasan pendidikan. Sebagian perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur ada di wilayah ini, antara lain Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Universitas Jember, Universitas Ma Chung dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain itu terdapat pula beberapa sekolah internasional seperti Wesley Internasional School, Bina Bangsa School, dan Charis National Academy.

Secara geografis, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III didominasi oleh dataran yang subur. Hal ini tak lepas dari pengaruh deretan gunung yang membujur dari tengah ke timur. Beberapa gunung yang potensial sebagai kawasan wisata antara lain Gunung Ijen di Banyuwangi, Gunung Semeru di Lumajang, dan Gunung Bromo di Probolinggo. Selain itu, dengan garis pantai yang hampir mengelilingi semua kota dan kabupatennya, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III

juga terkenal dengan pesona pantainya. Sebut saja Pantai Pasir Putih di bagian utara, Pulau Merah di ujung timur, dan deretan pantai selatan seperti Pantai Popoh, Prigi, Balekambang, Ngliyep, dan Papuma.

2. Fungsi dan Tugas Kanwil DJP Jawa Timur III

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- c. pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalan potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
- d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- e. pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
- f. pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
- g. pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
- h. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- i. pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;
- j. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- l. pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
- m. pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor

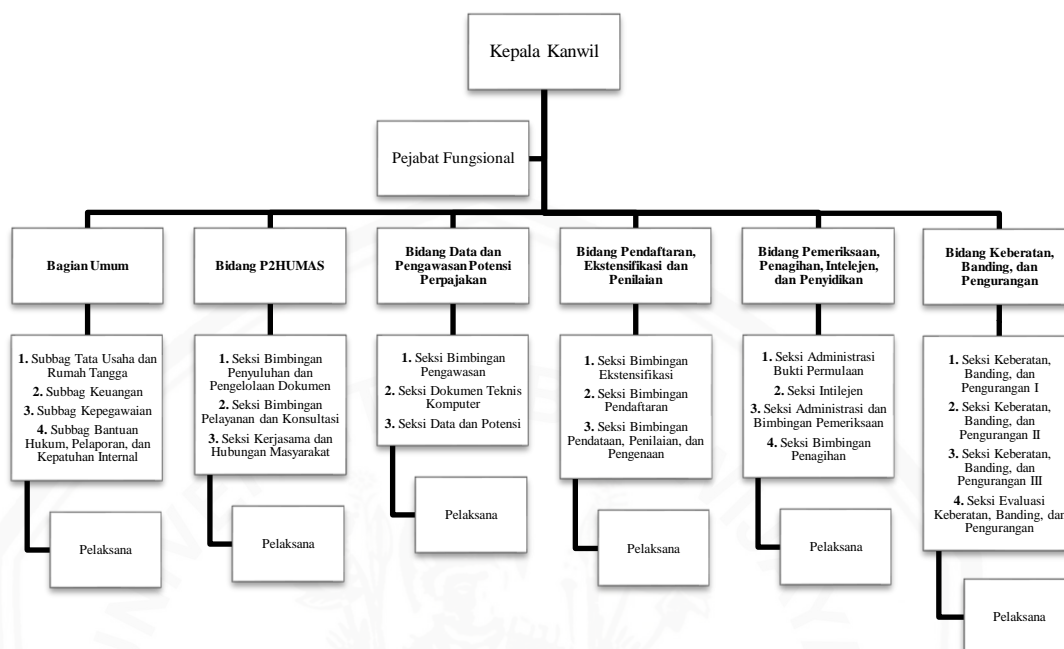
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

3. Lokasi Kanwil DJP Jawa Timur III

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor wilayah ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III berlokasi di Jalan Letjen S. Parman No. 100 Kota Malang. Kantor wilayah ini dipimpin oleh seorang kepala.

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Kanwil DJP Jawa Timur III

a. Struktur Organisasi



Gambar 3: Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJP Jawa Timur III (2017).

b. Deskripsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka dapat diberikan keterangan singkat mengenai fungsi dan tanggung jawab masing-masing bagian yaitu:

1) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, dan rumah tangga. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan kepegawaian;

- b) pelaksanaan urusan keuangan;
- c) pelaksanaan urusan bantuan hukum;
- d) pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan;
- e) pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
- f) pengelolaan kinerja;
- g) pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
- h) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2) Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b) pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perpajakan;
- c) pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis konsultasi perpajakan;

- d) pelaksanaan hubungan masyarakat;
- e) pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
- f) pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- g) pemeliharaan dan pemutakhiran website atau panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- h) pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- i) bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah; dan
- j) pelaksanaan kerja sama perpajakan.

3) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan, bimbingan penggalian potensi perpajakan, melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan pemberian dukungan teknis komputer, serta melakukan bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan pengenaan.

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian bimbingan teknis pengawasan;
- b) pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- c) bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;

- d) pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
- e) pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;
- f) pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
- g) pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back-up data; dan
- h) pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e- Filing*.

4) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;
- b) pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi; dan
- c) pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan.

5) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan teknis pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
- b) pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan perpajakan;
- c) pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d) pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- e) bantuan pelaksanaan penagihan;
- f) pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- g) pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan;
- h) pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; dan

- i) penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor(*peer review*).

6) Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, proses gugatan dan Peninjauan Kembali, serta bimbingan pembetulan Surat Keputusan. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian bimbingan dan penyelesaian keberatan;
- b) penyelesaian proses banding, proses gugatan, dan proses Peninjauan Kembali;
- c) pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;
- d) pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;
- e) pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- f) pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

5. Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Kanwil DJP Jawa Timur III memiliki wilayah kerja sebanyak 13 kabupaten dan 6 kotamadya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha). Berikut ini daftar

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III beserta kode KPP dan wilayah kerjanya:

Tabel 4.1 Daftar KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

No.	Kode KPP	Nama KPP	Wilayah Kerja	Jumlah Wajib Pajak (per Desember 2016)
1	622	KPP Pratama Kediri	Kota Kediri	74.481
2	623	KPP Pratama Malang Selatan	Sebagian Kota Malang	114.481
3	624	KPP Pratama Pasuruan	Kota dan Kabupaten Pasuruan	188.055
4	625	KPP Pratama Probolinggo	Kota, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang	177.607
5	626	KPP Pratama Jember	Kabupaten Jember	171.047
6	627	KPP Pratama Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	131.222
7	628	KPP Pratama Batu	Kota Batu	28.017
8	629	KPP Pratama Tulungagung	Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek	148.920
9	651	KPP Madya Malang	Seluruh wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III, khusus untuk Wajib Pajak Badan tertentu	2.063
10	652	KPP Pratama Malang Utara	Sebagian Kota Malang	91.953
11	653	KPP Pratama Blitar	Kota dan Kabupaten Blitar	117.433
12	654	KPP Pratama Kepanjen	Sebagian Kabupaten Malang	113.861
13	655	KPP Pratama Pare	Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk	222.610

Lanjutan Tabel 4.1 Daftar KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

No.	Kode KPP	Nama KPP	Wilayah Kerja	Jumlah Wajib Pajak (per Desember 2016)
14	656	KPP Pratama Situbondo	Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso	104.541
15	657	KPP Pratama Singosari	Sebagian Kabupaten Malang	105.108

Sumber: Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (2017).

B. Penyajian Data

Data yang diperoleh meliputi data tahunan jumlah Surat Teguran yang diterbitkan 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dari tahun 2015-2017 lengkap dengan nilai dari Surat Teguran yang diterbitkan dan nilai pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran. Selain memperoleh data mengenai Surat Teguran, peneliti juga memperoleh data mengenai nilai dari Surat Paksa dan data nilai dari SPMP yang diterbitkan oleh 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III berikut pencairan tunggakan pajaknya.

1. Data Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Teguran tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Seksi Penagihan di KPP melakukan tindakan penagihan pajak aktif dengan penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran hanya merupakan tindakan penagihan pajak yang paling awal atau permulaan dalam proses penagihan pajak aktif yang diterbitkan oleh pejabat. Surat Teguran memiliki arti yang sama dengan surat peringatan atau surat lainnya yang sifatnya sama yaitu untuk menegur para

penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pelunasan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Surat Keputusan Banding (SK Banding), dan lain-lain. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Surat Teguran merupakan salah satu upaya untuk memaksa kepatuhan Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak dapat dikurangi dan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Berikut data Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 4.2 Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Teguran

No.	Nama KPP	Tahun	Jumlah (Lembar)	Nilai (Rupiah)
1	KPP Pratama Kediri	2015	2.666	10.340.961.034
		2016	21.708	35.560.550.460
		2017	5.485	12.773.468.399
2	KPP Pratama Malang Selatan	2015	761	8.556.263.872
		2016	757	6.023.639.424
		2017	1.750	7.660.635.906
3	KPP Pratama Pasuruan	2015	3.348	13.338.265.323
		2016	1.918	23.015.745.851
		2017	1.811	1.618.708.622
4	KPP Pratama Probolinggo	2015	995	10.265.278.738
		2016	1.244	12.972.776.106
		2017	1.682	3.678.700.960

Lanjutan Tabel 4.2 Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Teguran

No.	Nama KPP	Tahun	Jumlah (Lembar)	Nilai (Rupiah)
5	KPP Pratama Jember	2015	755	4.464.659.378
		2016	182	6.766.409.333
		2017	2.836	9.080.166.277
6	KPP Pratama Banyuwangi	2015	1.039	11.672.445.757
		2016	506	5.318.392.216
		2017	1.031	16.850.416.257
7	KPP Pratama Batu	2015	1.099	2.415.791.987
		2016	524	3.081.179.344
		2017	502	3.004.596.831
8	KPP Pratama Tulungagung	2015	4.512	6.697.398.075
		2016	3.841	19.455.319.224
		2017	3.588	3.525.054.863
9	KPP Madya Malang	2015	872	85.731.721.478
		2016	708	84.521.762.871
		2017	441	54.961.637.570
10	KPP Pratama Malang Utara	2015	1.431	6.547.457.612
		2016	1.205	10.267.378.894
		2017	1.807	6.310.080.329
11	KPP Pratama Blitar	2015	1.835	54.432.069.729
		2016	2.482	9.794.700.946
		2017	3.765	4.688.078.588
12	KPP Pratama Kepanjen	2015	1.746	2.777.342.815
		2016	1.263	3.631.797.966
		2017	2.059	1.010.904.546
13	KPP Pratama Pare	2015	358	3.150.063.771
		2016	2.295	6.148.289.449
		2017	1.901	5.338.784.854
14	KPP Pratama Situbondo	2015	559	1.214.380.191
		2016	3.537	12.120.140.965
		2017	1.417	1.644.709.979
15	KPP Pratama Singosari	2015	1.004	10.058.230.516
		2016	416	1.120.000.000
		2017	3.838	10.001.824.019

Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III (2017).

Banyaknya Surat Teguran yang diterbitkan oleh 15 KPP di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015-2017 adalah sejumlah 22.980 lembar dengan nilai Rp231.662.330.272 pada tahun 2015, 42.586 lembar bernilai Rp236.806.903.705 pada tahun 2016, dan 33.913 lembar dengan nilai Rp142.147.768.000 pada tahun 2017.

2. Data Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Paksa tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Banyaknya Surat Paksa yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dapat dilihat dari jumlah penerbitan Surat Paksa, nilai Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak dari Surat Paksa. Surat Paksa merupakan tindakan lanjutan dari proses penagihan aktif setelah Surat Teguran, apabila jumlah utang pajak harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka pejabat berhak menerbitkan Surat Paksa. Berikut data Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 4.3 Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Paksa

No.	Nama KPP	Tahun	Jumlah (Lembar)	Nilai (Rupiah)
1	KPP Pratama Kediri	2015	1.843	8.104.007.945
		2016	2.799	14.563.986.331
		2017	787	21.855.293.353
2	KPP Pratama Malang Selatan	2015	519	7.028.202.794
		2016	307	2.732.408.944
		2017	488	2.765.490.962

Lanjutan Tabel 4.3 Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Paksa

No.	Nama KPP	Tahun	Jumlah (Lembar)	Nilai (Rupiah)
3	KPP Pratama Pasuruan	2015	1.188	11.130.759.484
		2016	1.170	18.378.150.340
		2017	608	4.721.353.465
4	KPP Pratama Probolinggo	2015	561	6.662.757.575
		2016	730	8.948.334.940
		2017	588	951.103.815
5	KPP Pratama Jember	2015	144	1.391.846.161
		2016	208	2.485.651.656
		2017	245	3.186.430.843
6	KPP Pratama Banyuwangi	2015	500	1.293.935.300
		2016	415	6.448.220.838
		2017	779	257.334.817
7	KPP Pratama Batu	2015	196	1.496.359.906
		2016	231	1.930.813.644
		2017	272	182.159.369
8	KPP Pratama Tulungagung	2015	1.168	6.847.091.491
		2016	1.456	1.026.636.426
		2017	822	6.769.186.341
9	KPP Madya Malang	2015	800	45.960.826.544
		2016	1.506	62.314.731.652
		2017	657	22.072.696.873
10	KPP Pratama Malang Utara	2015	721	5.671.297.801
		2016	908	3.416.619.663
		2017	942	7.281.985.895
11	KPP Pratama Blitar	2015	499	35.673.516.207
		2016	458	3.213.021.795
		2017	378	4.413.794.283
12	KPP Pratama Kepanjen	2015	1.784	3.403.202.906
		2016	2.229	3.520.553.369
		2017	1.675	4.742.113.619
13	KPP Pratama Pare	2015	363	2.154.370.991
		2016	1.087	1.754.755.402
		2017	740	1.005.511.643

Lanjutan Tabel 4.3 Jumlah Penerbitan dan Nilai Surat Paksa

No.	Nama KPP	Tahun	Jumlah (Lembar)	Nilai (Rupiah)
14	KPP Pratama Situbondo	2015	836	296.310.132
		2016	717	1.192.081.206
		2017	157	1.189.620.035
15	KPP Pratama Singosari	2015	758	5.403.878.395
		2016	821	2.041.589.841
		2017	1.071	2.859.344.798

Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III (2017).

Banyaknya Surat Paksa yang diterbitkan oleh 15 KPP di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sejumlah 37.131 lembar dengan total nilai Rp358.551.191.329. Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 11.880 lembar dengan nilai Rp142.518.363.632 tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 Surat Paksa diterbitkan sejumlah 15.042 lembar dengan nilai Rp132.036.742.403, dan kemudian Surat Paksa diterbitkan pada tahun 2017 sejumlah 10.209 lembar dengan nilai Rp83.996.085.294.

3. Data Jumlah Penerbitan dan Nilai SPMP tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Banyaknya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dapat dilihat dari jumlah penerbitan SPMP, total tunggakan pajaknya serta pencairan tunggakan pajak dari SPMP. SPMP merupakan salah satu tindakan lanjutan dari proses penagihan aktif setelah Surat Paksa, apabila jumlah utang pajak yang harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkannya Surat Paksa maka

pejabat berhak menerbitkan SPMP. Adapun prosedur penerbitan SPMP yang dilakukan oleh KPP di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III, sesuai dengan SPMP diterbitkan setelah jatuh tempo penerbitan Surat Paksa oleh KPP kepada wajib pajak maupun penanggung pajak yang dengan sengaja atau lalai dalam melunasi utang pajaknya. Berikut data SPMP yang diterbitkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 4.4 Jumlah Penerbitan dan Nilai SPMP

No.	Nama KPP	Tahun	Jumlah (Lembar)	Nilai (Rupiah)
1	KPP Pratama Kediri	2015	303	4.776.391.850
		2016	14	13.098.143.195
		2017	5	294.840.488
2	KPP Pratama Malang Selatan	2015	11	2.131.652.509
		2016	17	5.172.010.508
		2017	5	872.859.720
3	KPP Pratama Pasuruan	2015	121	5.588.013.410
		2016	37	1.158.293.312
		2017	54	1.692.750.352
4	KPP Pratama Probolinggo	2015	14	2.343.543.309
		2016	17	1.728.009.562
		2017	34	8.137.504.588
5	KPP Pratama Jember	2015	7	3.796.549.993
		2016	2	1.289.405.661
		2017	5	970.038.125
6	KPP Pratama Banyuwangi	2015	5	156.380.411
		2016	25	4.773.298.164
		2017	13	2.792.159.815
7	KPP Pratama Batu	2015	26	57.768.281.737
		2016	1	525.264.760
		2017	7	3.808.112.971
8	KPP Pratama Tulungagung	2015	242	24.670.542.016
		2016	50	3.763.719.706
		2017	46	29.857.531.455

Lanjutan Tabel 4.4 Jumlah Penerbitan dan Nilai SPMP

No.	Nama KPP	Tahun	Jumlah (Lembar)	Nilai (Rupiah)
9	KPP Madya Malang	2015	63	23.697.516.763
		2016	83	17.843.325.820
		2017	44	8.597.633.726
10	KPP Pratama Malang Utara	2015	13	775.167.739
		2016	14	4.521.508.199
		2017	9	815.721.619
11	KPP Pratama Blitar	2015	65	35.860.286.080
		2016	14	2.416.351.615
		2017	8	6.395.508.626
12	KPP Pratama Kepanjen	2015	45	7.257.808.641
		2016	78	2.215.130.220
		2017	52	1.310.251.920
13	KPP Pratama Pare	2015	18	1.024.157.609
		2016	34	11.618.121.436
		2017	33	3.118.188.192
14	KPP Pratama Situbondo	2015	6	1.095.998.142
		2016	2	138.238.297
		2017	10	1.083.319.354
15	KPP Pratama Singosari	2015	66	4.919.219.758
		2016	38	1.773.127.099
		2017	32	1.198.015.253

Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III (2017).

Banyaknya SPMP yang diterbitkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sejumlah 1.730 lembar dengan total nilai Rp292.398.194.835. Jumlah SPMP yang diterbitkan sebanyak 998 lembar dengan nilai Rp164.807.151.333 ditahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 SPMP diterbitkan sejumlah 409 lembar dengan nilai Rp65.532.639.828, dan kemudian SPMP diterbitkan pada tahun 2017 sejumlah 323 lembar dengan nilai Rp62.058.403.674.

4. Data Nilai Pencairan Tunggakan Pajak atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Data nilai pencairan tunggakan pajak hasil penelitian di Kanwil DJP Jawa Timur III dihitung berdasarkan hasil pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh atas pembayaran Wajib Pajak yang berasal dari surat teguran, surat paksa dan SPMP. Nilai pencairan tunggakan pajak dihitung per tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2017. Data nilai pencairan tunggakan pajak atas surat teguran, surat paksa, dan SPMP di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Pencairan Tunggakan Pajak atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP tahun 2015-2017

No.	Nama KPP	Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rupiah)		
			Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP
1	KPP Pratama Kediri	2015	2.059.727.217	1.357.893.011	894.551.633
		2016	3.034.922.569	642.715.506	1.564.398.895
		2017	2.995.647.373	7.718.396.380	9.999.397
2	KPP Pratama Malang Selatan	2015	287.998.143	2.079.937.312	1.106.622.821
		2016	608.711.689	193.374.670	1.523.117.735
		2017	202.618.526	110.931.539	291.436.241
3	KPP Pratama Pasuruan	2015	580.588.720	866.063.316	936.540.637
		2016	1.804.488.771	5.124.097.697	671.522.549
		2017	777.476.195	495.670.345	141.833.248
4	KPP Pratama Probolinggo	2015	754.325.580	791.329.847	200.000.000
		2016	536.775.029	1.583.850.337	817.396.512
		2017	86.325.609	256.886.603	447.390.840
5	KPP Pratama Jember	2015	749.083.479	298.104.933	777.396.512
		2016	808.828.031	132.921.344	1.289.405.661
		2017	1.308.016.628	318.643.084	191.386.477

Lanjutan Tabel 4.5 Pencairan Tunggakan Pajak atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP

No.	Nama KPP	Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rupiah)		
			Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP
6	KPP Pratama Banyuwangi	2015	825.909.657	170.464.727	70.884.760
		2016	541.072.745	346.888.688	891.161.125
		2017	227.520.845	124.766.817	263.171.034
7	KPP Pratama Batu	2015	591.169.536	992.630.479	2.336.917.440
		2016	1.850.846.951	1.803.005.603	525.364.750
		2017	305.163.317	261.709.106	478.229.167
8	KPP Pratama Tulungagung	2015	1.763.280.921	2.450.504.027	2.027.321.011
		2016	4.026.398.285	2.945.444.015	198.455.246
		2017	2.064.553.406	485.844.069	554.306.145
9	KPP Madya Malang	2015	32.606.102.925	22.306.270.403	7.284.415.931
		2016	48.388.554.050	12.294.814.647	4.060.299.338
		2017	4.610.067.334	18.741.934.669	6.610.511.935
10	KPP Pratama Malang Utara	2015	609.505.170	649.424.782	463.541.906
		2016	2.608.834.389	795.322.145	115.297.854
		2017	1.527.144.482	2.741.382.018	161.223.652
11	KPP Pratama Blitar	2015	2.835.822.825	1.952.675.623	1.263.071.066
		2016	995.658.823	290.770.077	1.717.994.792
		2017	221.777.282	1.794.976.619	209.133.582
12	KPP Pratama Kepanjen	2015	190.691.204	372.865.367	1.392.608.230
		2016	546.265.037	415.625.887	496.911.352
		2017	100.416.030	224.317.089	1.397.800.514
13	KPP Pratama Pare	2015	1.767.528.697	754.278.530	144.450.000
		2016	2.613.839.368	1.503.754.975	4.681.129.034
		2017	982.996.413	168.966.666	231.000.000
14	KPP Pratama Situbondo	2015	1.008.024.531	166.500.000	205.031.932
		2016	2.506.383.270	487.563.906	138.238.297
		2017	229.747.110	142.225.768	186.398.635
15	KPP Pratama Singosari	2015	847.630.215	1.200.039.245	1.964.980.900
		2016	360.731.116	502.536.336	664.514.087
		2017	3.063.840.553	352.629.360	548.533.622

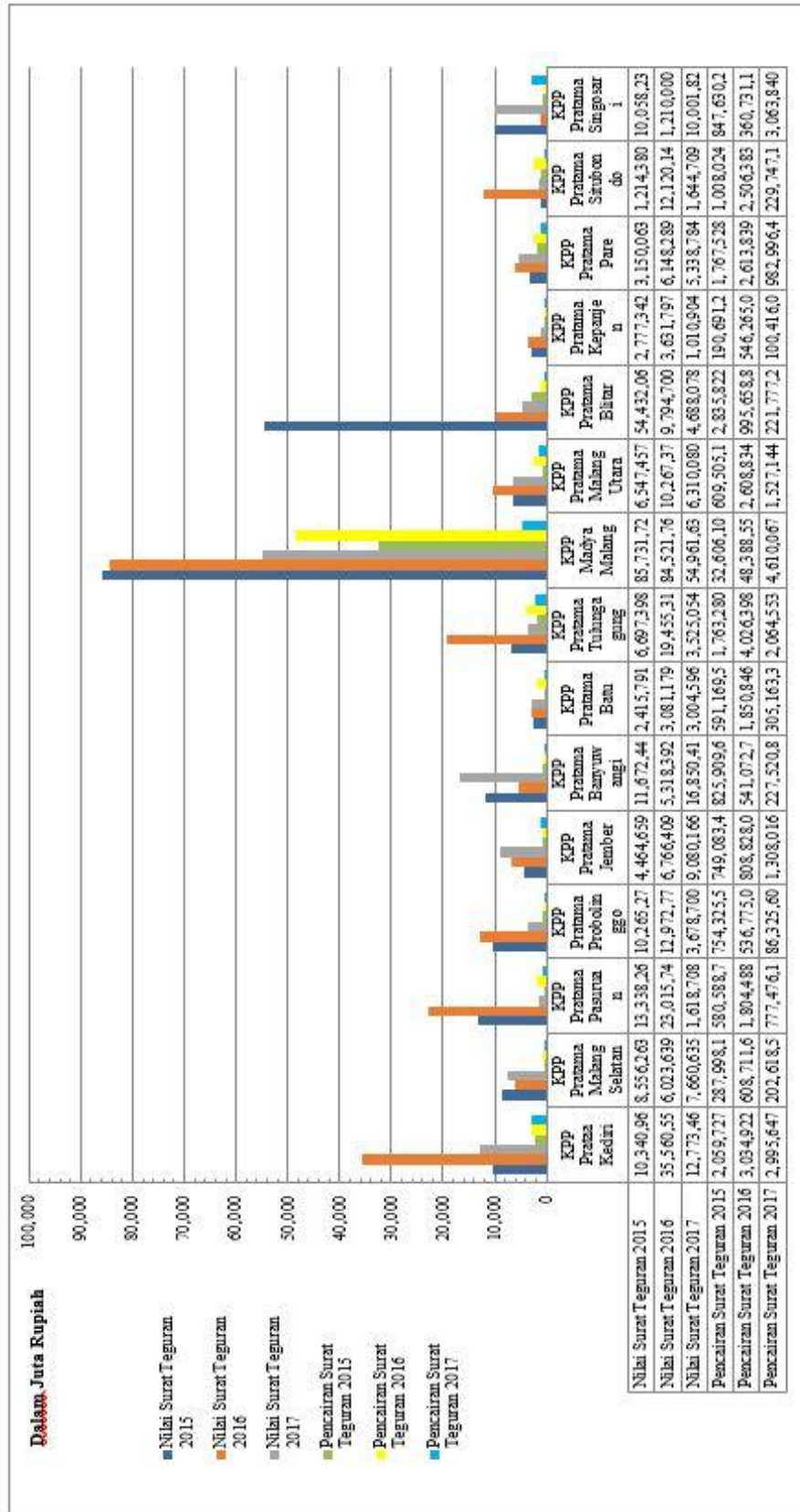
Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III (2017).

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat jumlah pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP oleh KPP wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015-2017. Jumlah pencairan tunggakan pajak tiap-tiap KPP berbeda-beda. Pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran dalam 3 (tiga) tahun terakhir paling tinggi terjadi di KPP Madya Malang dengan nilai pencairan mencapai Rp85.604.724.309. Pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran dan SPMP dalam 3 (tiga) tahun terakhir paling tinggi juga terjadi di KPP Madya Malang dengan nilai pencairan tunggakan atas Surat Paksa sebesar Rp53.343.019.719 dan SPMP senilai Rp17.955.227.204.

C. Analisis dan Intrepretasi Data

1. Efektivitas Penagihan Pajak dalam upaya Pencairan tunggakan Pajak dengan Surat Teguran tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Berikut ini adalah gambar diagram yang menunjukkan nilai dan pencairan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Teguran yang diterbitkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 oleh 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Berdasarkan diagram di bawah dapat dilihat perkembangan nilai Surat Teguran yang telah diterbitkan dibandingkan dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III pada tahun 2015-2017. Nilai dari Surat Teguran dan pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2017.



Gambar 4. Data Nilai Surat Teguran dan Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Teguran di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015-2017
Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan, data diolah (2017).

Tunggakan pajak mengalami kenaikan disebabkan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) baru dan Surat Tagihan Pajak (STP) baru. Sebaliknya, tunggakan pajak mengalami penurunan karena adanya pembayaran pajak atau pelunasan tunggakan pajak, keberatan, dan daluarsa pajak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Andik Martrijono selaku Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur III dalam wawancaranya pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 11.15 menyatakan bahwa:

“Kalau tunggakan pajak naik itu dikarenakan adanya SKP baru dan STP baru yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah. Sedangkan kalau tunggakan pajak yang turun itu bisa terjadi karena pembayaran, keberatan dan banding yang diterima seluruhnya atau sebagian, yang menyebabkan tunggakan pajak Wajib Pajak berkurang. Tunggakan pajak juga bisa berkurang karena adanya daluarsa pajak. Tapi kebanyakan yang terjadi di sini, pengurangan tunggakan pajak disebabkan karena pembayaran pajak dari Wajib Pajak.”

Nilai Surat Teguran yang diterbitkan berdasarkan diagram di atas paling banyak di KPP Madya Malang. Reliasasi pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran berdasarkan diagram di atas paling banyak juga terjadi di KPP Madya Malang. Hal ini terjadi karena KPP Madya mempunyai wilayah kerja seluruh wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III, khusus untuk Wajib Pajak Badan tertentu.

Perhitungan efektivitas Surat Teguran dapat dihitung dengan rumus perbandingan yaitu realisasi jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Teguran dengan nilai dari Surat Teguran pada tahun tersebut dikalikan seratus persen. Perhitungan rumus efektivitas dengan Surat Teguran yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran}}{\text{Nilai Surat Teguran yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas dari pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran tahun 2015-2017, maka dibuat tabel efektivitas agar mudah dianalisis. Berikut tabel pengukuran kriteria efektivitas dari Surat Teguran:

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Teguran			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
1	KPP Pratama Kediri	2015	10.340.961.034	2.059.727.217	19,9%	Sangat tidak efektif
		2016	35.560.550.460	3.034.922.569	8,5%	Sangat tidak efektif
		2017	12.773.468.399	2.995.647.373	23,3%	Sangat tidak efektif
2	KPP Pratama Malang Selatan	2015	8.556.263.872	287.998.143	3,4%	Sangat tidak efektif
		2016	6.023.639.424	608.711.689	10,1%	Sangat tidak efektif
		2017	7.660.635.906	202.618.526	26,4%	Sangat tidak efektif
3	KPP Pratama Pasuruan	2015	13.338.265.323	580.588.720	4,4%	Sangat tidak efektif
		2016	23.015.745.851	1.804.488.771	7,8%	Sangat tidak efektif
		2017	1.618.708.622	777.476.195	48,0%	Tidak efektif
4	KPP Pratama Probolinggo	2015	10.265.278.738	754.325.580	7,3%	Sangat tidak efektif
		2016	12.972.776.106	536.775.029	4,1%	Sangat tidak efektif
		2017	3.678.700.960	86.325.609	2,3%	Sangat tidak efektif
5	KPP Pratama Jember	2015	4.464.659.378	749.083.479	16,8%	Sangat tidak efektif
		2016	6.766.409.333	808.828.031	12,0%	Sangat tidak efektif
		2017	9.080.166.277	1.308.016.628	14,4%	Sangat tidak efektif
6	KPP Pratama Banyuwangi	2015	11.672.445.757	825.909.657	7,1%	Sangat tidak efektif
		2016	5.318.392.216	541.072.745	10,2%	Sangat tidak efektif
		2017	16.850.416.257	227.520.845	1,4%	Sangat tidak efektif
7	KPP Pratama Batu	2015	2.415.791.987	591.169.536	24,5%	Sangat tidak efektif
		2016	3.081.179.344	1.850.846.951	60,1%	Cukup efektif
		2017	3.004.596.831	305.163.317	10,2%	Sangat tidak efektif

Lanjutan Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Teguran			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
8	KPP Pratama Tulungagung	2015	6.697.398.075	1.763.280.921	26,3%	Sangat tidak efektif
		2016	19.455.319.224	4.026.398.285	20,7%	Sangat tidak efektif
		2017	3.525.054.863	2.064.553.406	58,6%	Tidak efektif
9	KPP Madya Malang	2015	85.731.721.478	32.606.102.925	38,0%	Sangat tidak efektif
		2016	84.521.762.871	48.388.554.050	57,2%	Tidak efektif
		2017	54.961.637.570	4.610.067.334	8,4%	Sangat tidak efektif
10	KPP Pratama Malang Utara	2015	6.547.457.612	609.505.170	9,3%	Sangat tidak efektif
		2016	10.267.378.894	2.608.834.389	25,4%	Sangat tidak efektif
		2017	6.310.080.329	1.527.144.482	24,2%	Sangat tidak efektif
11	KPP Pratama Blitar	2015	54.432.069.729	2.835.822.825	5,2%	Sangat tidak efektif
		2016	9.794.700.946	995.658.823	10,2%	Sangat tidak efektif
		2017	4.688.078.588	221.777.282	4,7%	Sangat tidak efektif
12	KPP Pratama Kepanjen	2015	2.777.342.815	190.691.204	6,9%	Sangat tidak efektif
		2016	3.631.797.966	546.265.037	15,0%	Sangat tidak efektif
		2017	1.010.904.546	100.416.030	9,9%	Sangat tidak efektif
13	KPP Pratama Pare	2015	3.150.063.771	1.767.528.697	56,1%	Tidak efektif
		2016	6.148.289.449	2.613.839.368	42,5%	Tidak efektif
		2017	5.338.784.854	982.996.413	18,4%	Sangat tidak efektif
14	KPP Pratama Situbondo	2015	1.214.380.191	1.008.024.531	83,0%	Efektif
		2016	12.120.140.965	2.506.383.270	20,7%	Sangat tidak efektif
		2017	1.644.709.979	229.747.110	14,0%	Sangat tidak efektif
15	KPP Pratama Singosari	2015	10.058.230.516	847.630.215	8,4%	Sangat tidak efektif
		2016	1.210.000.000	360.731.116	29,8%	Sangat tidak efektif
		2017	10.001.824.019	3.063.840.553	30,6%	Sangat tidak efektif
JUMLAH		2015	231.662.330.276	47.477.388.820		
		2016	239.888.083.049	71.232.310.123		
		2017	142.147.768.000	18.703.311.103		

Lanjutan Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Teguran			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
RATA-RATA		2015	15.444.155.352	3.165.159.255	21,1%	Sangat tidak efektif
		2016	15.992.538.870	4.748.820.675	22,2%	Sangat tidak efektif
		2017	9.476.517.867	1.246.887.407	19,7%	Sangat tidak efektif
NILAI MAKSIMUM		2015	85.731.721.478	32.606.102.925	83,0%	Efektif
		2016	84.521.762.871	48.388.554.050	60,1%	Cukup efektif
		2017	54.961.637.570	4.610.067.334	58,6%	Tidak efektif
NILAI MINIMUM		2015	1.214.380.191	190.691.204	3,4%	Sangat tidak efektif
		2016	1.210.000.000	360.731.116	4,1%	Sangat tidak efektif
		2017	1.010.904.546	86.325.609	1,4%	Sangat tidak efektif

Sumber: Data diolah (2017)

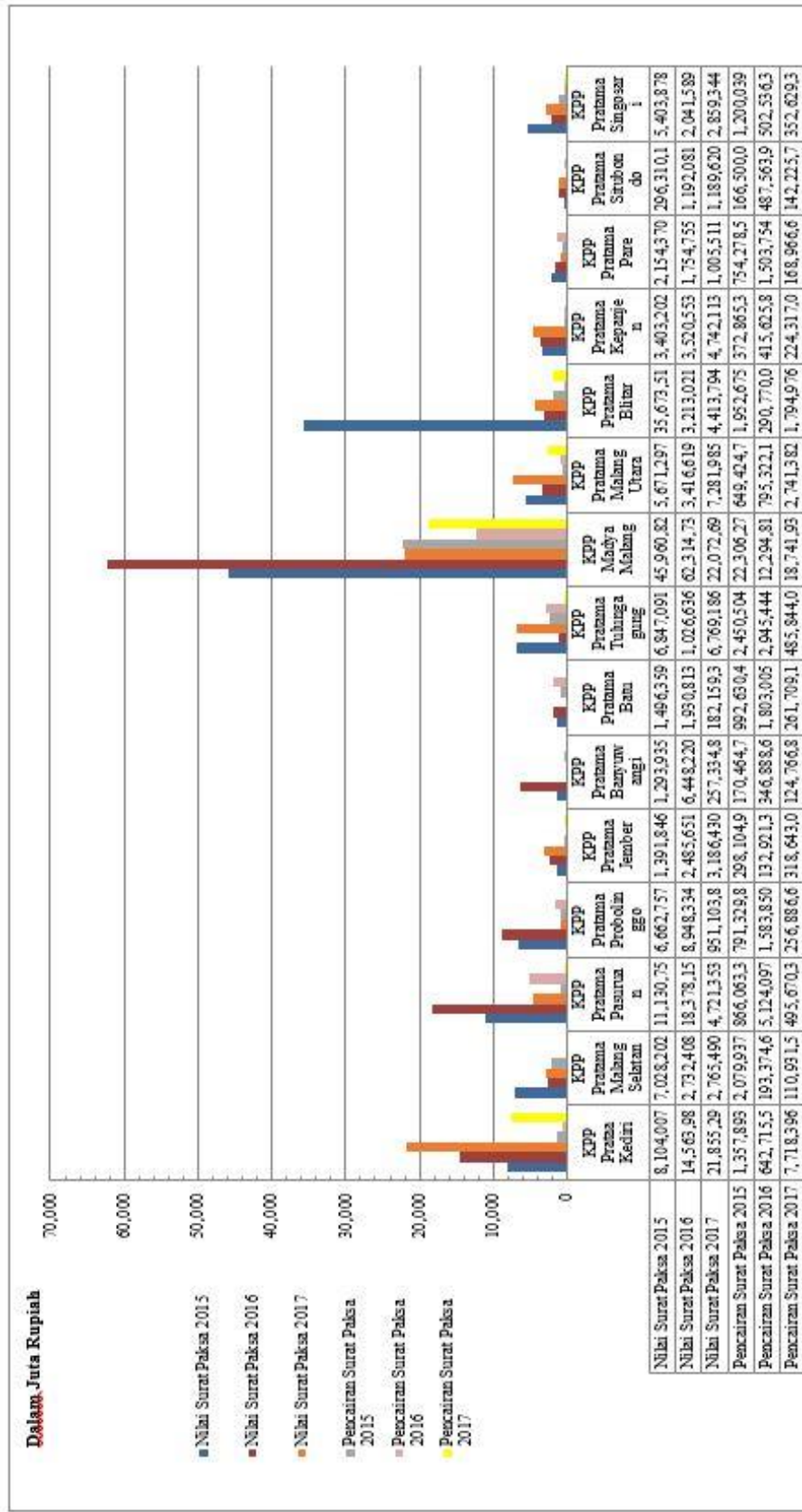
Berdasarkan nilai Surat Teguran yang diterbitkan dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Teguran, terbukti bahwa penerbitan Surat Teguran oleh 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dapat dikatakan sangat tidak efektif karena hasil perhitungan tingkat efektivitasnya masih dibawah 40%-60% pada klasifikasi pengukuran efektivitas menurut Jones dan Pendlebury (2000:13). Pada tahun 2015, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran sebesar 21,1% dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2016, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran sebesar 22,2% dikategorikan sangat tidak efektif. Dan pada tahun 2017, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan Pajak dengan Surat Teguran sebesar 19,7% juga dikategorikan sangat tidak efektif.

Nilai rata-rata Surat Teguran yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah

sebesar Rp.13.637.737.363. Kemudian, nilai minimum Surat Teguran yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.1.010.904.546 Selanjutnya, nilai maksimum Surat Teguran yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.85.731.721.478.

2. Efektivitas Penagihan Pajak dalam upaya Pencairan tunggakan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Berikut ini adalah gambar diagram yang menunjukkan nilai dan pencairan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Paksa yang diterbitkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Berdasarkan diagram di bawah dapat dilihat perkembangan nilai dari Surat Paksa yang telah diterbitkan dibandingkan dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dari Surat Paksa di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Nilai Surat Paksa yang diterbitkan berdasarkan diagram di bawah paling banyak di KPP Madya Malang. Pencairan tunggakan pajak dari Surat Paksa berdasarkan diagram di bawah paling banyak di KPP Madya Malang.



Gambar 5. Data Nilai Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak dari Surat Paksa di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015-2017
Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan, data diolah (2017).

Perhitungan efektivitas Surat Paksa dapat dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan yaitu realisasi jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Paksa dengan nilai dari Surat Paksan pada tahun tersebut dikalikan seratus persen. Perhitungan rumus efektivitas dengan Surat Paksa yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa}}{\text{Nilai Surat Paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas dari pencairan tunggakan pajak yang disebabkan oleh Surat Paksa tahun 2015-2017, maka dibuat tabel efektivitas agar mudah dianalisis. Berikut tabel pengukuran kriteria efektivitas dari Surat Paksa sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Paksa			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
1	KPP Pratama Kediri	2015	8.104.007.945	1.357.893.011	16,8%	Sangat tidak efektif
		2016	14.563.986.331	642.715.506	4,4%	Sangat tidak efektif
		2017	21.855.293.353	7.718.396.380	35,3%	Sangat tidak efektif
2	KPP Pratama Malang Selatan	2015	7.028.202.794	2.079.937.312	29,6%	Sangat tidak efektif
		2016	2.732.408.944	193.374.670	7,1%	Sangat tidak efektif
		2017	2.765.490.962	110.931.539	4,0%	Sangat tidak efektif
3	KPP Pratama Pasuruan	2015	11.130.759.484	866.063.316	7,8%	Sangat tidak efektif
		2016	18.378.150.340	5.124.097.697	27,9%	Sangat tidak efektif
		2017	4.721.353.465	495.670.345	10,5%	Sangat tidak efektif
4	KPP Pratama Probolinggo	2015	6.662.757.575	791.329.847	11,9%	Sangat tidak efektif
		2016	8.948.334.940	1.583.850.337	17,7%	Sangat tidak efektif
		2017	951.103.815	256.886.603	27,0%	Sangat tidak efektif

Lanjutan Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Paksa			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
5	KPP Pratama Jember	2015	1.391.846.161	298.104.933	21,4%	Sangat tidak efektif
		2016	2.485.651.656	132.921.344	5,3%	Sangat tidak efektif
		2017	3.186.430.843	318.643.084	10,0%	Sangat tidak efektif
6	KPP Pratama Banyuwangi	2015	1.293.935.300	170.464.727	13,2%	Sangat tidak efektif
		2016	6.448.220.838	346.888.688	5,4%	Sangat tidak efektif
		2017	257.334.817	124.766.817	48,5%	Tidak efektif
7	KPP Pratama Batu	2015	1.496.359.906	992.630.479	66,3%	Cukup efektif
		2016	1.930.813.644	1.803.005.603	93,4%	Efektif
		2017	182.159.369	261.709.106	143,7%	Sangat efektif
8	KPP Pratama Tulungagung	2015	6.847.091.491	2.450.504.027	35,8%	Sangat tidak efektif
		2016	1.026.636.426	2.945.444.015	286,9%	Sangat efektif
		2017	6.769.186.341	485.844.069	7,2%	Sangat tidak efektif
9	KPP Madya Malang	2015	45.960.826.544	22.306.270.403	48,5%	Tidak efektif
		2016	62.314.731.652	12.294.814.647	19,7%	Sangat tidak efektif
		2017	22.072.696.873	18.741.934.669	84,9%	Efektif
10	KPP Pratama Malang Utara	2015	5.671.297.801	649.424.782	11,5%	Sangat tidak efektif
		2016	3.416.619.663	795.322.145	23,3%	Sangat tidak efektif
		2017	7.281.985.895	2.741.382.018	37,6%	Sangat tidak efektif
11	KPP Pratama Blitar	2015	35.673.516.207	1.952.675.623	5,5%	Sangat tidak efektif
		2016	3.213.021.795	290.770.077	9,0%	Sangat tidak efektif
		2017	4.413.794.283	1.794.976.619	40,7%	Tidak efektif
12	KPP Pratama Kepanjen	2015	3.403.202.906	372.865.367	11,0%	Sangat tidak efektif
		2016	3.520.553.369	415.625.887	11,8%	Sangat tidak efektif
		2017	4.742.113.619	224.317.089	4,7%	Sangat tidak efektif
13	KPP Pratama Pare	2015	2.154.370.991	754.278.530	35,2%	Sangat tidak efektif
		2016	1.754.755.402	1.503.754.975	85,7%	Efektif
		2017	1.005.511.643	168.966.666	16,8%	Sangat tidak efektif

Lanjutan Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Paksa			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
14	KPP Pratama Situbondo	2015	296.310.132	166.500.000	56,2%	Tidak efektif
		2016	1.192.081.206	487.563.906	40,9%	Tidak efektif
		2017	1.189.620.035	142.225.768	12,0%	Sangat tidak efektif
15	KPP Pratama Singosari	2015	5.403.878.395	1.200.039.245	22,2%	Sangat tidak efektif
		2016	2.041.589.841	502.536.336	24,6%	Sangat tidak efektif
		2017	2.859.344.798	352.629.360	12,3%	Sangat tidak efektif
JUMLAH		2015	142.518.363.632	36.408.981.602		
		2016	133.967.556.047	29.062.685.833		
		2017	84.253.420.111	31.197.898.114		
RATA-RATA		2015	9.501.224.242	2.427.265.440	26,2%	Sangat tidak efektif
		2016	8.931.170.403	1.937.512.389	44,2%	Tidak efektif
		2017	5.616.894.674	2.262.618.675	33,0%	Sangat tidak efektif
NILAI MAKSIMUM		2015	45.960.826.544	22.306.270.403	66,3%	Cukup efektif
		2016	62.314.731.652	12.294.814.647	286,9%	Sangat efektif
		2017	22.072.696.873	18.741.934.669	143,7%	Sangat efektif
NILAI MINIMUM		2015	296.310.132	166.500.000	5,5%	Sangat tidak efektif
		2016	1.026.636.426	132.921.344	4,4%	Sangat tidak efektif
		2017	182.159.369	110.931.539	4,0%	Sangat tidak efektif

Sumber: Data diolah (2017)

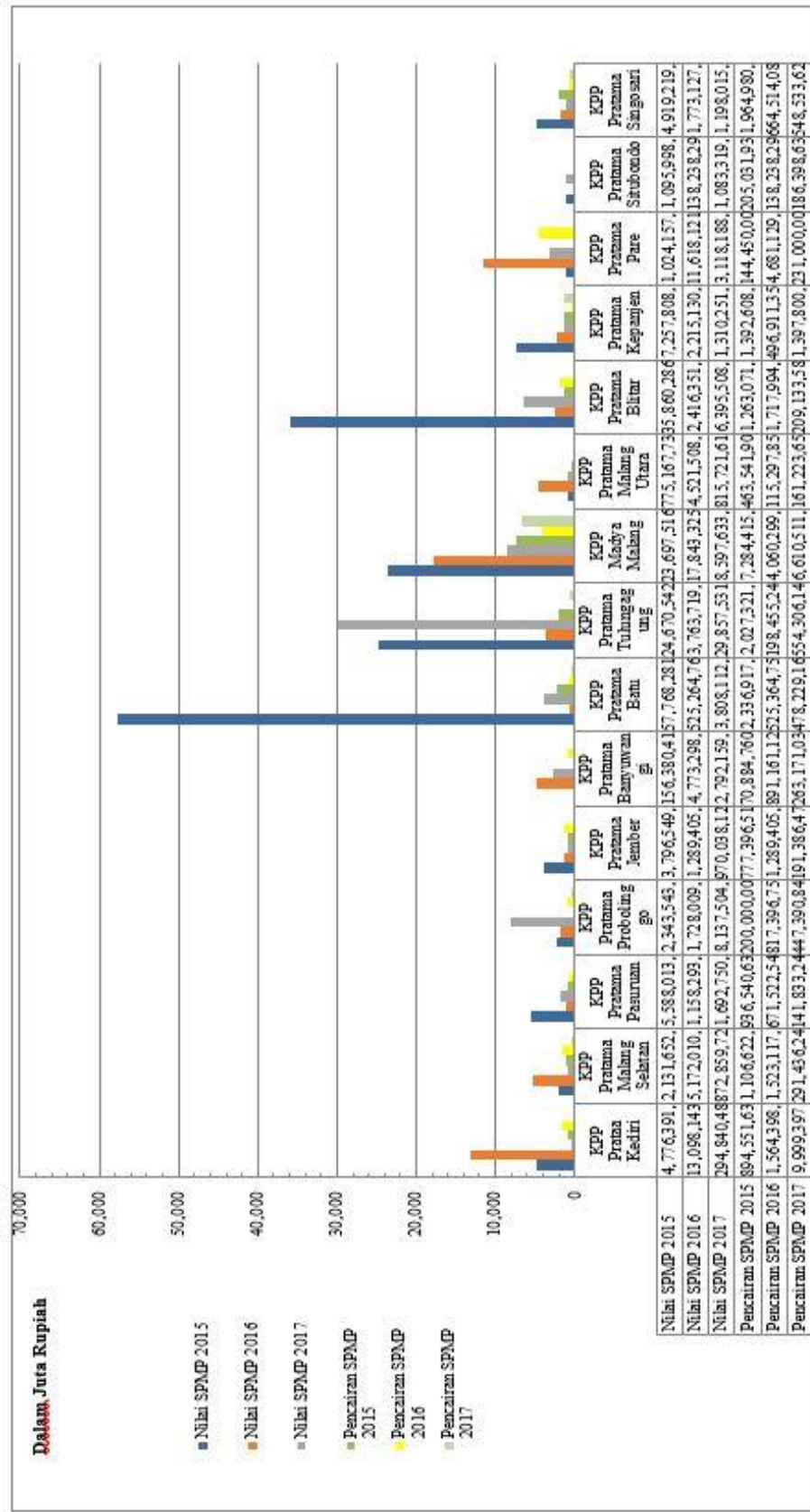
Berdasarkan nilai Surat Paksa yang diterbitkan dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat Paksa, terbukti bahwa penerbitan Surat Paksa oleh 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dapat dikatakan sangat tidak efektif karena hasil perhitungan tingkat efektivitasnya masih dibawah 40%-60% pada klasifikasi pengukuran efektivitas menurut Jones dan Pendlebury (2000:13). Pada tahun 2015, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar 26,2% dikategorikan sangat tidak efektif. Pada

tahun 2016, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebesar 44,2% dikategorikan tidak efektif. Dan pada tahun 2017, diperoleh tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar 33,0% dikategorikan sangat tidak efektif.

Nilai rata-rata Surat Paksa yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.8.016.429.773. Kemudian, nilai minimum Surat Paksa yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.182.159.369. Selanjutnya, nilai maksimum Surat Paksa yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.62.314.731.652.

3. Efektivitas Penagihan Pajak dalam upaya Pencairan tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tahun 2015-2017 di KPP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Berikut ini adalah gambar diagram yang menunjukkan nilai dan pencairan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.



Gambar 6. Data Nilai SPMP dan Pencairan Tunggakan Pajak dari SPMP di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015-2017

Sumber: Seksi Bimbingan Penagihan, data diolah (2017).

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat perkembangan nilai SPMP yang telah diterbitkan dibandingkan dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dari SPMP di 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Nilai dari SPMP dan pencairan tunggakan pajak dari SPMP mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Nilai SPMP yang diterbitkan berdasarkan diagram diatas paling banyak di KPP Pratama Batu. Sedangkan pencairan tunggakan pajak dari SPMP berdasarkan diagram di atas paling banyak di KPP Madya Malang.

Perhitungan efektivitas SPMP dapat dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan yaitu realisasi jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan SPMP dengan nilai dari SPMP pada tahun tersebut dikalikan seratus persen. Perhitungan rumus efektivitas dengan SPMP yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak dengan SPMP}}{\text{Nilai SPMP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas dari pencairan tunggakan pajak yang disebabkan oleh SPMP tahun 2015-2015, maka dibuat tabel efektivitas agar mudah dianalisis. Berikut tabel pengukuran kriteria efektivitas dari SPMP:

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan SPMP Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
1	KPP Pratama Kediri	2015	4.776.391.850	894.551,633	18,7%	Sangat tidak efektif
		2016	13.098.143.195	1.564.398.895	11,9%	Sangat tidak efektif
		2017	294.840.488	9.999.397	3,4%	Sangat tidak efektif

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan SPMP Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
2	KPP Pratama Malang Selatan	2015	2.131.652.509	1.106.622.821	51,9%	Tidak efektif
		2016	5.172.010.508	1.523.117.735	29,4%	Sangat tidak efektif
		2017	872.859.720	291.436.241	33,4%	Sangat tidak efektif
3	KPP Pratama Pasuruan	2015	5.588.013.410	936.540.637	16,8%	Sangat tidak efektif
		2016	1.158.293.312	671.522.549	58,0%	Tidak efektif
		2017	1.692.750.352	141.833.248	8,4%	Sangat tidak efektif
4	KPP Pratama Probolinggo	2015	2.343.543.309	200.000.000	8,5%	Sangat tidak efektif
		2016	1.728.009.562	817.396.512	47,3%	Tidak efektif
		2017	8.137.504.588	447.390.840	5,5%	Sangat tidak efektif
5	KPP Pratama Jember	2015	3.796.549.993	777.396.512	20,5%	Sangat tidak efektif
		2016	1.289.405.661	1.289.405.661	100,0%	Sangat efektif
		2017	970.038.125	191.386.477	19,7%	Sangat tidak efektif
6	KPP Pratama Banyuwangi	2015	156.380.411	70.884.760	45,3%	Tidak efektif
		2016	4.773.298.164	891.161.125	18,7%	Sangat tidak efektif
		2017	2.792.159.815	263.171.034	9,4%	Sangat tidak efektif
7	KPP Pratama Batu	2015	57.768.281.737	2.336.917.440	4,0%	Sangat tidak efektif
		2016	525.264.760	525.364.750	100,0%	Sangat efektif
		2017	3.808.112.971	478.229.167	12,6%	Sangat efektif
8	KPP Pratama Tulungagung	2015	24.670.542.016	2.027.321.011	8,2%	Sangat tidak efektif
		2016	3.763.719.706	198.455.246	5,3%	Sangat tidak efektif
		2017	29.857.531.455	554.306.145	2,3%	Sangat tidak efektif
9	KPP Madya Malang	2015	23.697.516.763	7.284.415.931	30,7%	Sangat tidak efektif
		2016	17.843.325.820	4.060.299.338	22,8%	Sangat tidak efektif
		2017	8.597.633.726	6.610.511.935	76,9%	Cukup fektif
10	KPP Pratama Malang Utara	2015	775.167.739	463.541.906	59,8%	Tidak efektif
		2016	4.521.508.199	115.297.854	2,5%	Sangat tidak efektif
		2017	815.721.619	161.223.652	19,8%	Sangat tidak efektif

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan SPMP Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

No.	Nama KPP	Tahun	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan			
			Nilai	Pencairan	Persentase	Keterangan
11	KPP Pratama Blitar	2015	35.860.286.080	1.263.071.066	3,5%	Sangat tidak efektif
		2016	2.416.351.615	1.717.994.792	71,1%	Cukup efektif
		2017	6.395.508.626	209.133.582	3,3%	Sangat tidak efektif
12	KPP Pratama Kepanjen	2015	7.257.808.641	1.392.608.230	19,2%	Sangat tidak efektif
		2016	2.215.130.220	496.911.352	22,4%	Sangat tidak efektif
		2017	1.310.251.920	1.397.800.514	106,7%	Sangat efektif
13	KPP Pratama Pare	2015	1.024.157.609	144.450.000	14,1%	Sangat tidak efektif
		2016	11.618.121.436	4.681.129.034	40,3%	Tidak fektif
		2017	3.118.188.192	231.000.000	7,4%	Sangat tidak efektif
14	KPP Pratama Situbondo	2015	1.095.998.142	205.031.932	18,7%	Sangat tidak efektif
		2016	138.238.297	138.238.297	100,0%	Sangat efektif
		2017	1.083.319.354	186.398.635	17,2%	Sangat tidak efektif
15	KPP Pratama Singosari	2015	4.919.219.758	1.964.980.900	39,9%	Sangat tidak efektif
		2016	1.773.127.099	664.514.087	37,5%	Sangat tidak efektif
		2017	1.198.015.253	548.533.622	45,8%	Tidak efektif
JUMLAH		2015	175,861,509,967	21,068,334,779		
		2016	72.033.947.554	19.355.207.470		
		2017	70,444,436,204	11,722,354,489		
RATA-RATA		2015	11,724,100,664	1,404,555,652	26,2%	Sangat tidak efektif
		2016	4.802.263.170	1,290,347,148	44,2%	Tidak efektif
		2017	4,696,295,747	781,490,299	33,0%	Sangat tidak efektif
NILAI MAKSIMUM		2015	57.768.281.737	7.284.415.931	59,8%	Tidak efektif
		2016	17.843.325.820	4.681.129.034	100,0%	Sangat efektif
		2017	29.857.531.455	6.610.511.935	106,7%	Sangat efektif
NILAI MINIMUM		2015	156.380.411	70.884.760	3,5%	Sangat tidak efektif
		2016	138.238.297	115.297.854	2,5%	Sangat tidak efektif
		2017	294.840.488	9.999.397	2,3%	Sangat tidak efektif

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan nilai SPMP yang diterbitkan dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan penerbitan SPMP, terbukti bahwa penerbitan SPMP oleh 15 KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dapat dikatakan sangat tidak efektif karena hasil perhitungan tingkat efektivitasnya masih dibawah 40%-60% pada klasifikasi pengukuran efektivitas menurut Jones dan Pendlebury (2000:13). Pada tahun 2015, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan pajak dengan SPMP sebesar 23,2% dikategorikan sangat tidak efektif. Pada tahun 2016, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan Pajak dengan SPMP sebesar 44,5% dikategorikan tidak efektif. Dan pada tahun 2017, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan Pajak dengan SPMP sebesar 26,2% dikategorikan sangat tidak efektif.

Nilai rata-rata SPMP yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.7.151.997.638. Kemudian, nilai minimum SPMP yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.138.238.297. Selanjutnya, nilai maksimum SPMP yang dikeluarkan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III selama tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp.57.768.281.737.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan di 15 KPP di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya Surat Tegihan Pajak (STP) baru yang diterbitkan setiap tahun. Seperti yang dikatakan oleh Bapak

Andik Matrijono selaku kepala seksi Bimbingan Penagihan di Kanwil DJP Jawa Timur III dalam wawancaranya pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 11.15 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Perkembangan tunggakan pajak meningkat, tetapi tidak terlalu signifikan. Setiap tahun ada Surat Tagihan Pajak (STP) baru, pengurangan pembayaran, dan daluarsa pajak. Pelaksanaan tindakan penagihan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP setiap tahun meningkat.”

Potensi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan dalam mengoptimalkan target penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur III tergolong masih rendah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Andik Matrijono selaku kepala seksi Bimbingan Penagihan di Kanwil DJP Jawa Timur III dalam wawancaranya pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 11.15 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Penerimaan pajak dari penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan se Kanwil hanya sedikit, kurang dari 20%. Kebanyakan penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan penagihan.”

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan yang telah dilakukan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III diperoleh rata-rata tingkat efektivitas penagihan <40% yang dikategorikan sangat tidak efektif. Faktor utama yang menjadi kendala penagihan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Andik Matrijono selaku kepala seksi Bimbingan Penagihan di Kanwil DJP Jawa Timur III dalam wawancaranya pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 11.15 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kendala faktor internal tidak ada. Cuma kendala faktor eksternal, yaitu kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Banyak Wajib Pajak yang tidak sadar pajak dan tidak mau membayar pajak berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan. Mereka tidak tahu tentang sanksi yang akan didapat kalau tidak membayar pajak. Kebanyakan Wajib Pajak yang sudah disampaikan peringatan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa responnya masih biasa saja, nanti kalau sudah mau disita, diblokir, atau disandera baru mau membayar. Salah satu upaya kami untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dengan melakukan sosialisasi, seperti *tax gathering*.”

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh melalui lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan tunggakan pajak meningkat dari tahun ke tahun, namun potensi penerimaan pajak melalui tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan penyitaan di KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III tergolong rendah, yaitu <20%. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang masih tergolong rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

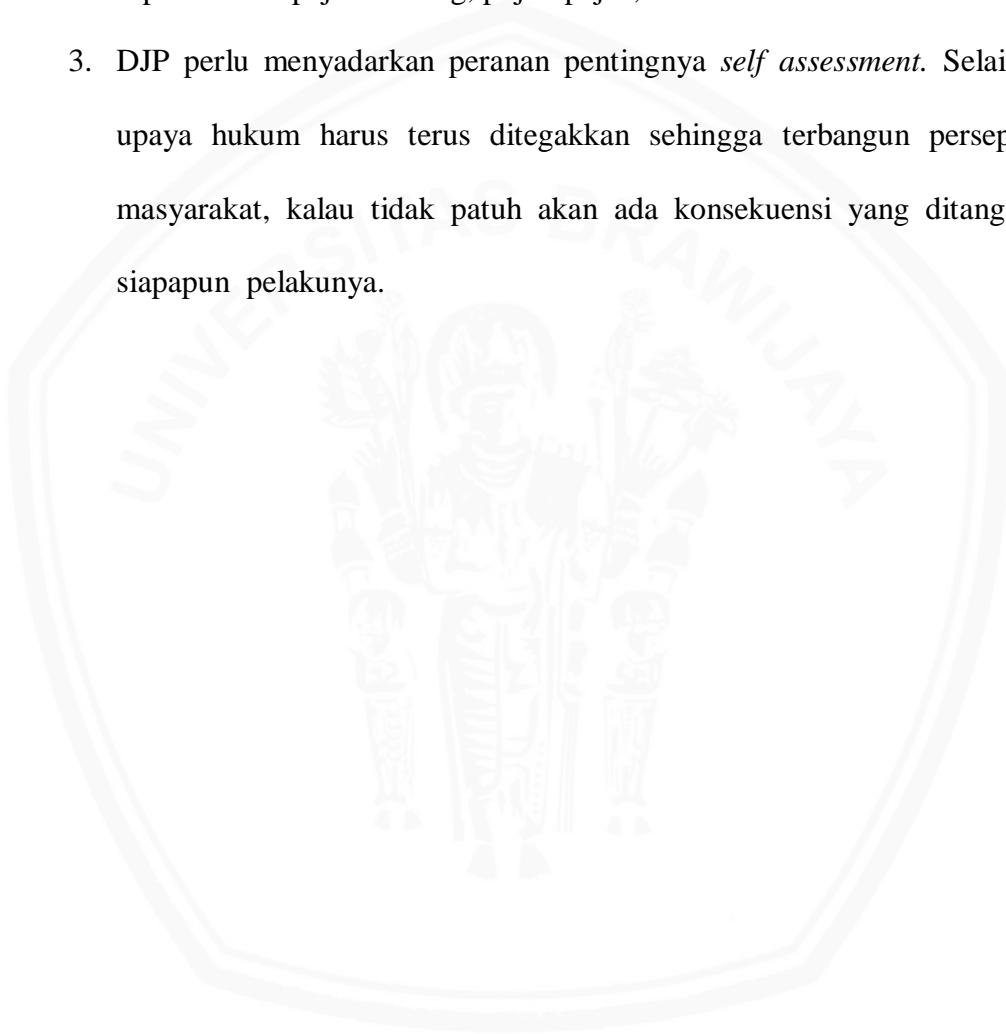
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam Bab IV, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 dikategorikan sangat tidak efektif, tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 dikategorikan sangat tidak efektif, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 juga dikategorikan sangat tidak efektif.

Efektivitas penagihan pajak yang tergolong sangat tidak efektif disebabkan karena adanya hambatan yang terjadi. Adapun yang menjadi hambatan dalam penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan di KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya yang tergolong masih rendah. Banyak Wajib Pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan, juga sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kampanye tentang hakikat serta proses administrasi pajak; daftar-bayar-lapor harus dilakukan secara lebih intensif.
2. Terkait dengan pelayanan, DJP harus secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat; seperti mobil pajak keliling, pojok pajak, dan *call center*.
3. DJP perlu menyadarkan peranan pentingnya *self assessment*. Selain itu, upaya hukum harus terus ditegakkan sehingga terbangun persepsi di masyarakat, kalau tidak patuh akan ada konsekuensi yang ditanggung, siapapun pelakunya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury. 2000. *Public Sector Accounting*. England: Financial Times Prentice Hall.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Blitar: Bayumedia Publishing
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- _____. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, Methew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Eddition*. USA: Sage Publications,.Inc
- Moleong. Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak, Timbul H. dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia ed. 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang dan Peraturan:

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Republik Indonesia Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Jurnal dan Skripsi:

Syahputra, M. Sulhan. 2015. *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.

Walawengko, Tingkan L.U. 2016. *Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon*". Jurnal EMBA Vol.4 No 1 Maret 2016, Hal. 799-806.

Wahyudi, Misbachul. 2016. *"Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu"*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.